

**JOINT MARKET ASSESMENT (JMA)
BENCANA BANJIR & LONGSOR SUMATERA
di
PROVINSI ACEH, SUMATERA UTARA, SUMATERA
BARAT
23-31 DESEMBER 2025**

KELOMPOK KERJA BANTUAN NON
TUNAI (POKJA BANTU)



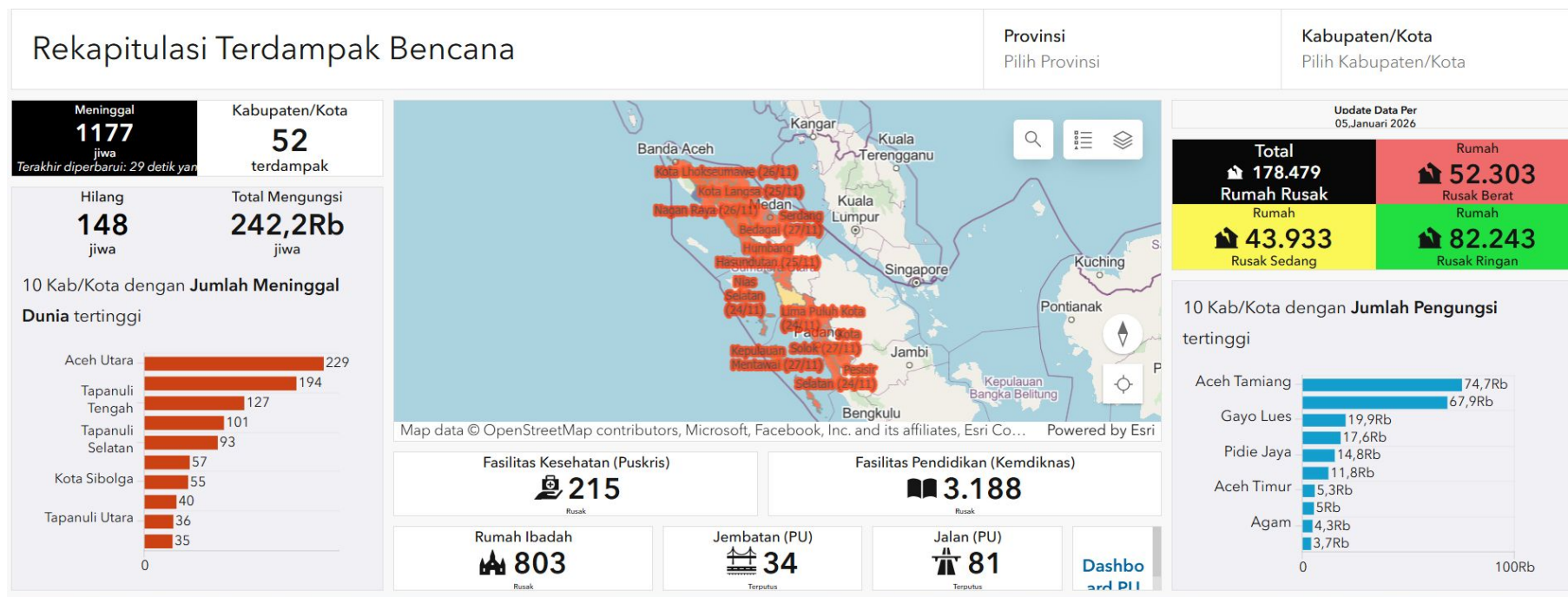
LEMBAGA PENDUKUNG JMA



Latar Belakang

Bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya pada mata pencaharian dan akses terhadap kebutuhan dasar. Gangguan terhadap infrastruktur, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi lokal berpotensi melemahkan fungsi pasar dan memperburuk kerentanan rumah tangga terdampak.

Berdasarkan data BNPB per 5 Januari 2025, total 52 kabupaten/ Kota terdampak dari 3 provinsi dengan 178.479 rumah rusak, 1.177 jiwa meninggal, 148 jiwa hilang, dan 242.200 jiwa mengungsi. Aceh Tamiang dan Aceh Utara memiliki jumlah pengungsi tertinggi. Selain itu, fasilitas umum yang rusak dan tertimbun lumpur juga mempengaruhi aktivitas dan livelihood masyarakat, dimana terdapat 3.188 fasilitas pendidikan rusak, 81 jalan, dan 31 jembatan.





LATAR BELAKANG

Dalam konteks respon kemanusiaan, pemahaman terhadap kondisi pasar menjadi krusial untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya tepat sasaran tetapi juga mendukung pemulihan ekonomi lokal. Oleh karena itu, Joint Market Assessment ini dilakukan untuk menilai fungsi pasar, ketersediaan dan keterjangkauan barang, stabilitas harga, serta kapasitas pedagang pasca bencana, sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan yang berbasis bukti dalam menentukan kelayakan dan desain intervensi berbasis pasar, termasuk Cash and Voucher Assistance (CVA).

TUJUAN

Tujuan JMA ini adalah:

1. Menilai tingkat fungsi pasar di wilayah terdampak.
2. Menganalisis ketersediaan, harga, dan stabilitas komoditas utama.
3. Mengidentifikasi hambatan akses, ketersediaan dan pemanfaatan pasar bagi rumah tangga terdampak.
4. Menentukan kelayakan dan risiko implementasi Cash and Voucher Assistance.

RUANG LINGKUP & PENDEKATAN

- Assessment ini mencakup pasar-pasar utama di wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan fokus pada komoditas kebutuhan dasar pangan dan non-pangan serta layanan pendukungnya. Populasi sasaran meliputi pedagang pasar, penyedia layanan, Lembaga non pemerintah dan rumah tangga terdampak bencana.
- Pelaksanaan dalam Joint Market Assessment dilakukan oleh Lembaga-Lembaga yang bersedia mendukung dalam proses assessment di wilayah terdampak yang sekaligus wilayah yang dibantu.
- Market Assesment dalam Response Emergency adalah *ITERATIVE PROCESS** atau dapat ditinjau kembali dan diperbarui dengan data dan informasi yang tersedia

KETERBATASAN

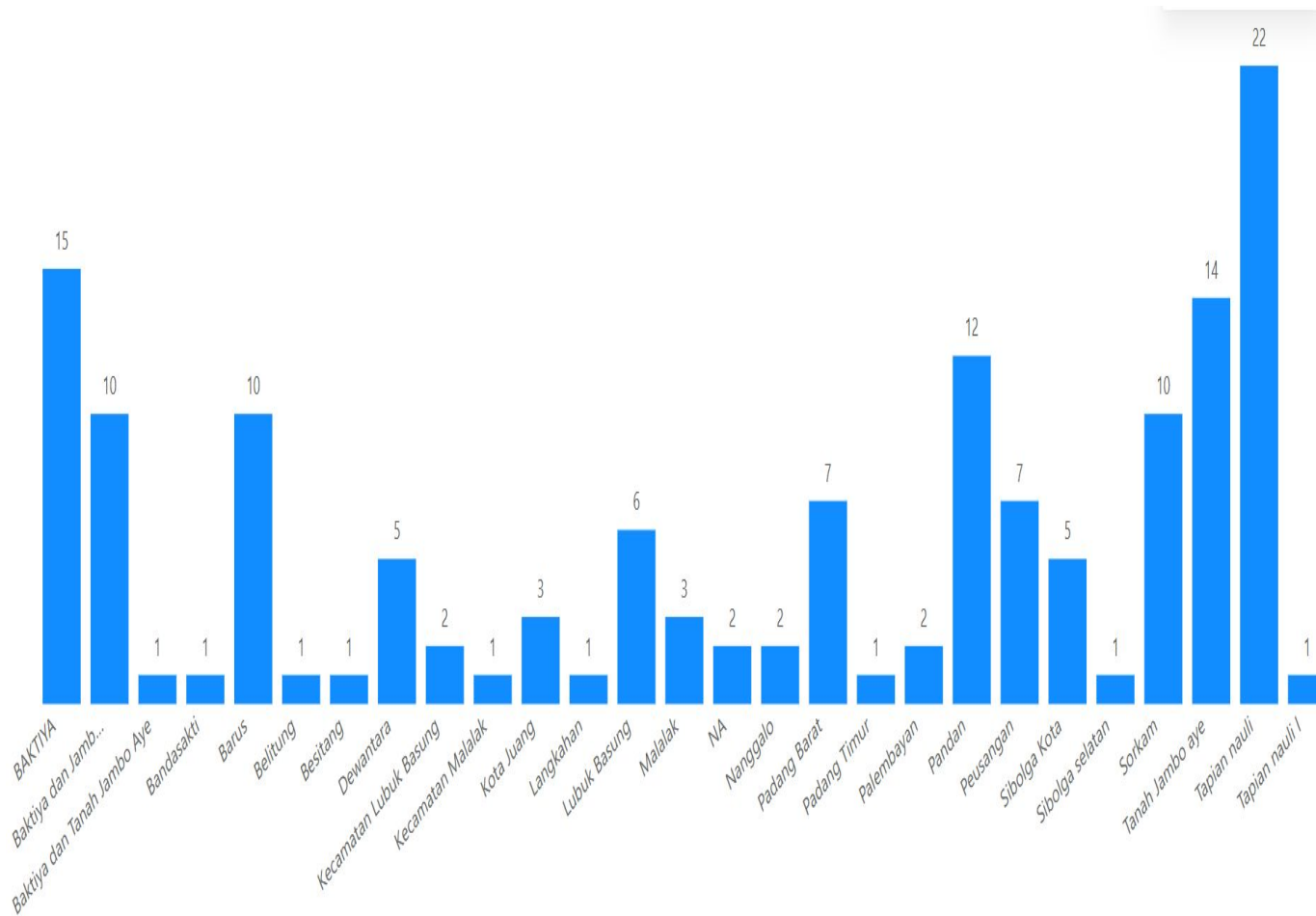
Keterbatasan assessment meliputi:

- Waktu pengumpulan data yang terbatas pada periode 23-31 Desember 2025
- Kondisi akses infrastruktur yang belum sepenuhnya pulih di beberapa lokasi.
- Fluktuasi Harga dikarenakan ketersediaan yang terbatas dan permintaan yang tinggi
- Informasi yang cepat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi response bencana di wilayah terdampak
- Asesmen ini memiliki keterbatasan pada wilayah dan jumlah responden, sehingga tidak dapat sepenuhnya mewakili seluruh kondisi pasar terdampak. Wilayah seperti Aceh Tamiang, Gayo Lues, dan Tapanuli Selatan yang berdasarkan hasil JNA masih terbatas akses nya perlu dimonitor lebih lanjut.

METODOLOGI

- Data primer dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan pemerintah, pedagang, penyedia layanan, lembaga non pemerintah dan rumah tangga terdampak. Data ini menggunakan KOBO TOOLS
- Data sekunder diperoleh dari laporan pemerintah, pemantauan harga, serta sumber data dan statistik resmi.
- Hasil data JMA secara visual dapat diakses melalui Power BI: [Microsoft Power BI](#)

LOKASI ASSESMENT



Market Assessment ini dilakukan di 3 Provinsi.

Aceh:

1. **Kab. Aceh Utara** (Baktiya, Tanah Jambo Aye, Bandasakti, Dewantara, Langkahan) dan
2. **Kab. Bireun** (Kota Juang dan Peusangan)

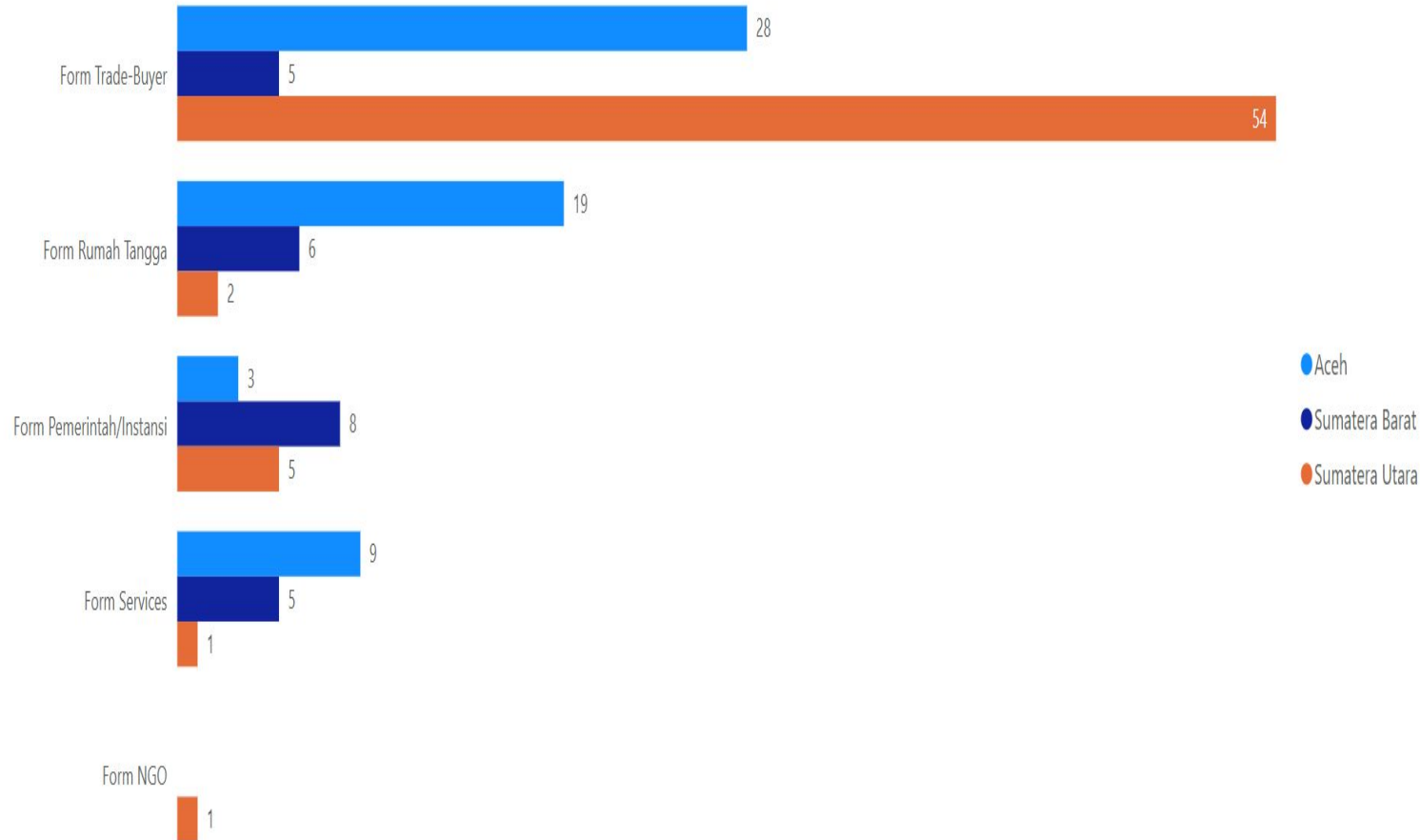
Sumatera Utara:

1. **Kab. Langkat** (Belitung & Besitang),
2. **Kab. Tapanuli Tengah** (Barus, Pandan, Sorkam, Tapian Nauli), dan
3. **Kota Sibolga** (Sibolga Kota dan selatan)

Sumatera Barat:

1. **Kab. Agam** (Lubuk Basung, Malalak, Palembang) dan
2. **Kota Padang** (Nanggalo, Padang Barat, Padang Timur)

TARGET & JUMLAH RESPONDEN

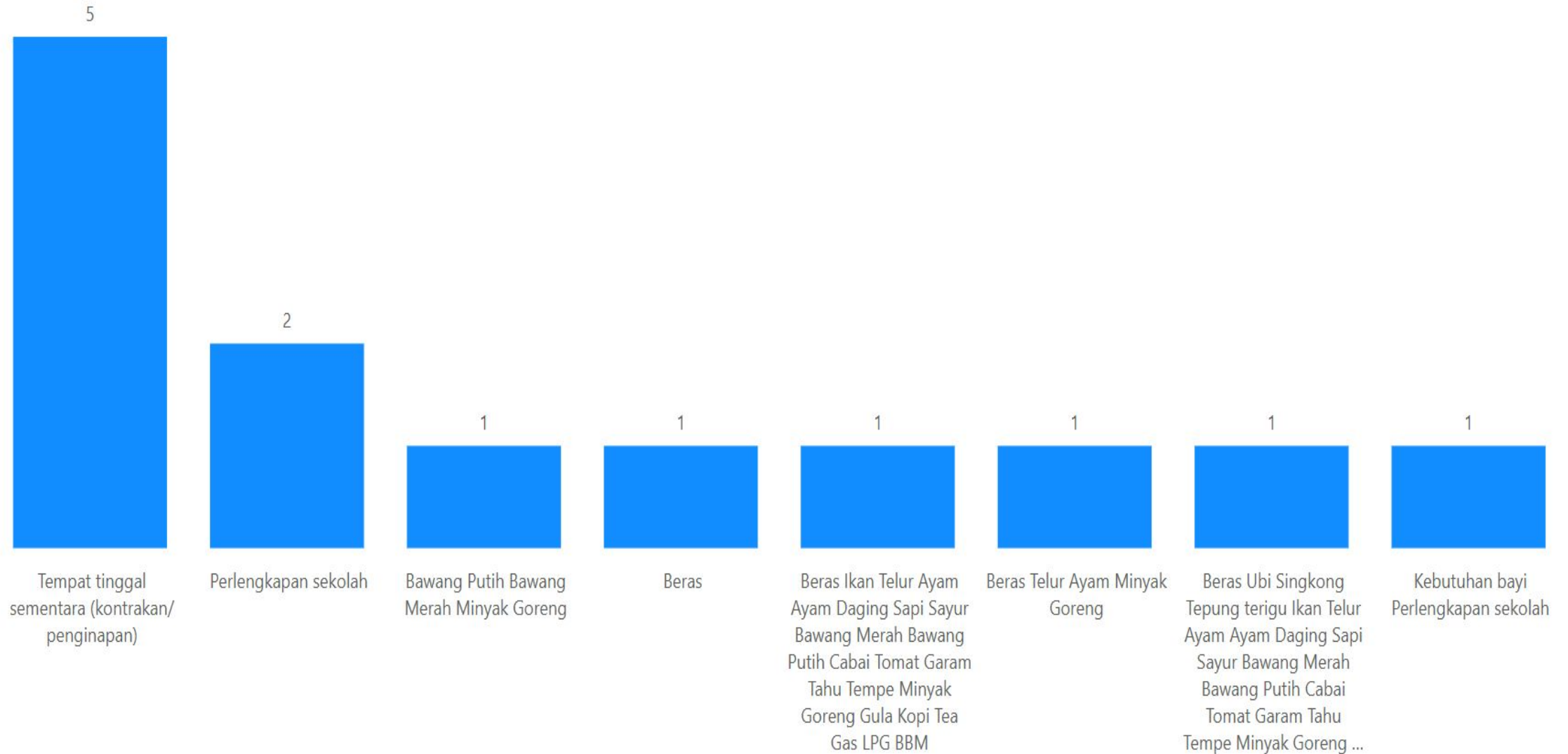


JMA dilakukan kepada pemerintah, lembaga penyedia layanan, pedagang, NGO, dan rumah tangga terdampak dengan total **146 respondent** yang tersebar dari 3 provinsi.



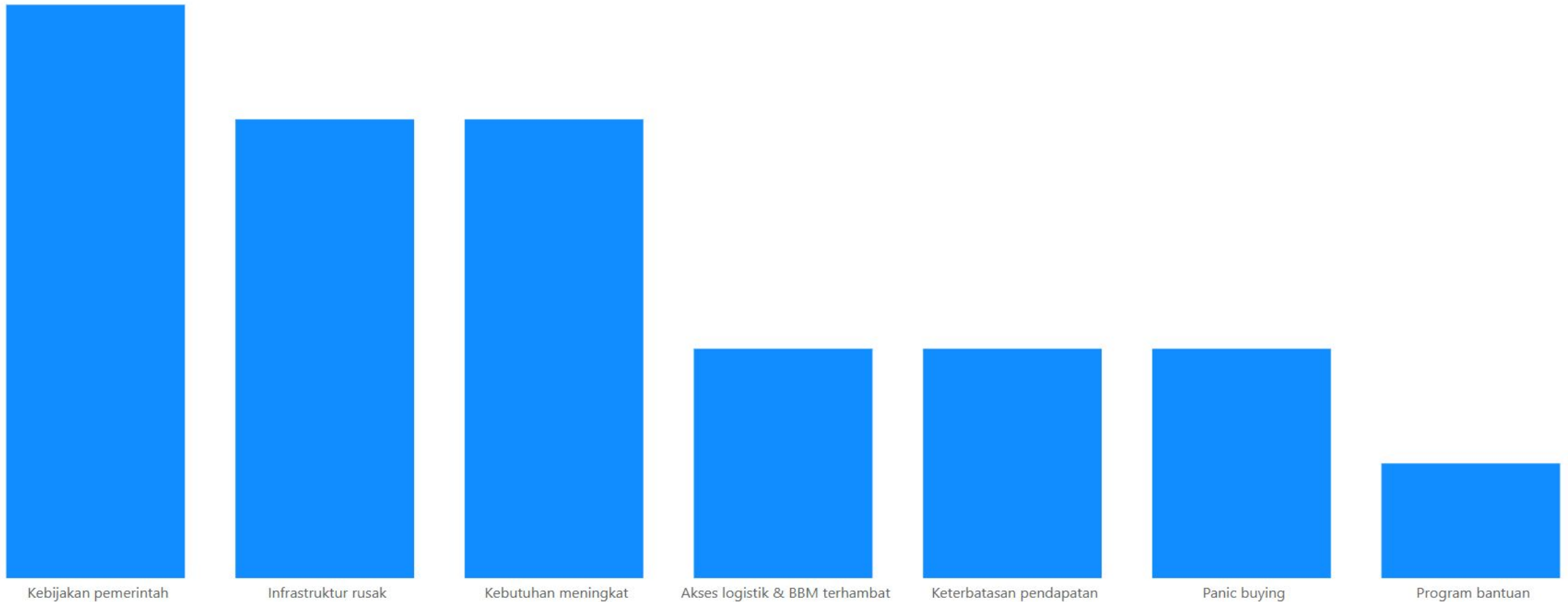
Respondent Distributor/ Trader

KOMODITI YANG DIKAJI



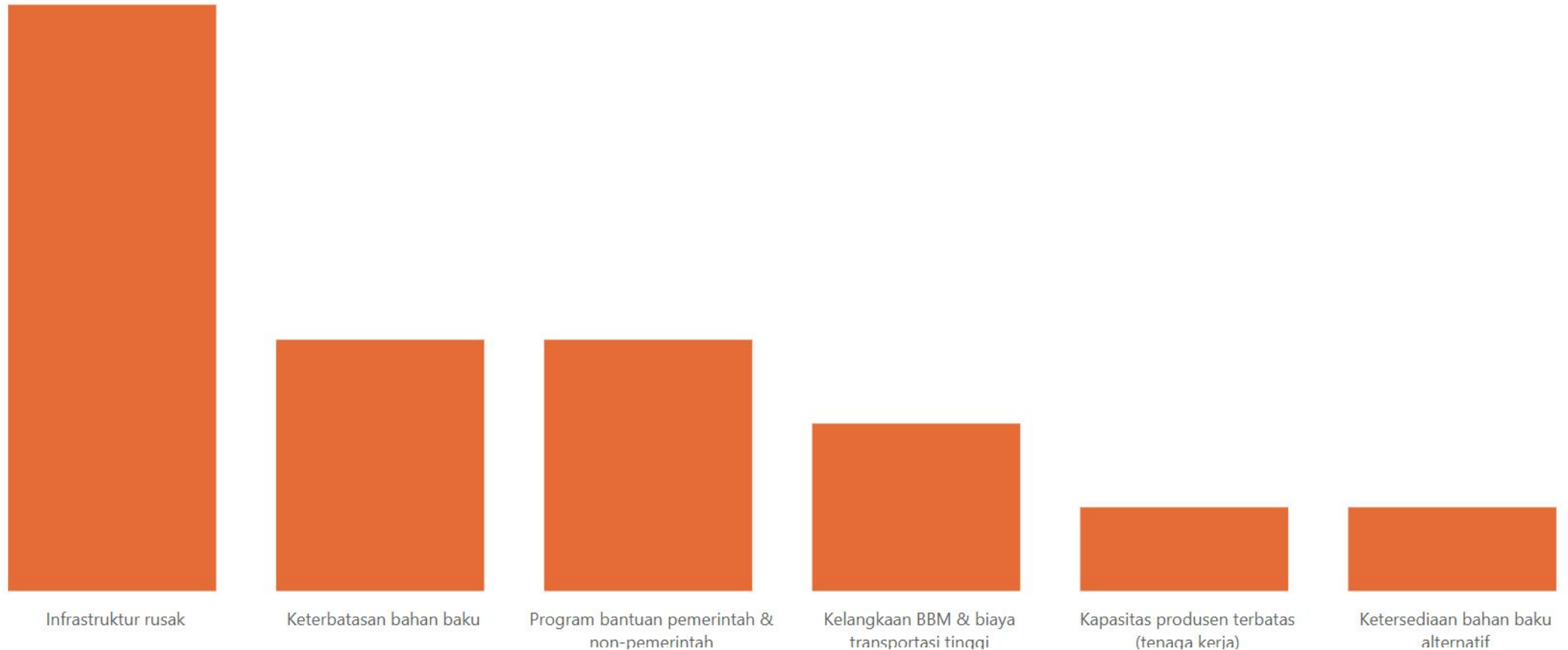
KARAKTERISTIK PASAR DARI 3 PROPINSI

Penyebab Trend **Permintaan** Produk Meningkatkan/Menurun



KARAKTERISTIK PASAR DARI 3 PROPINSI

Penyebab Trend **Ketersediaan** Produk Meningkat/Menurun

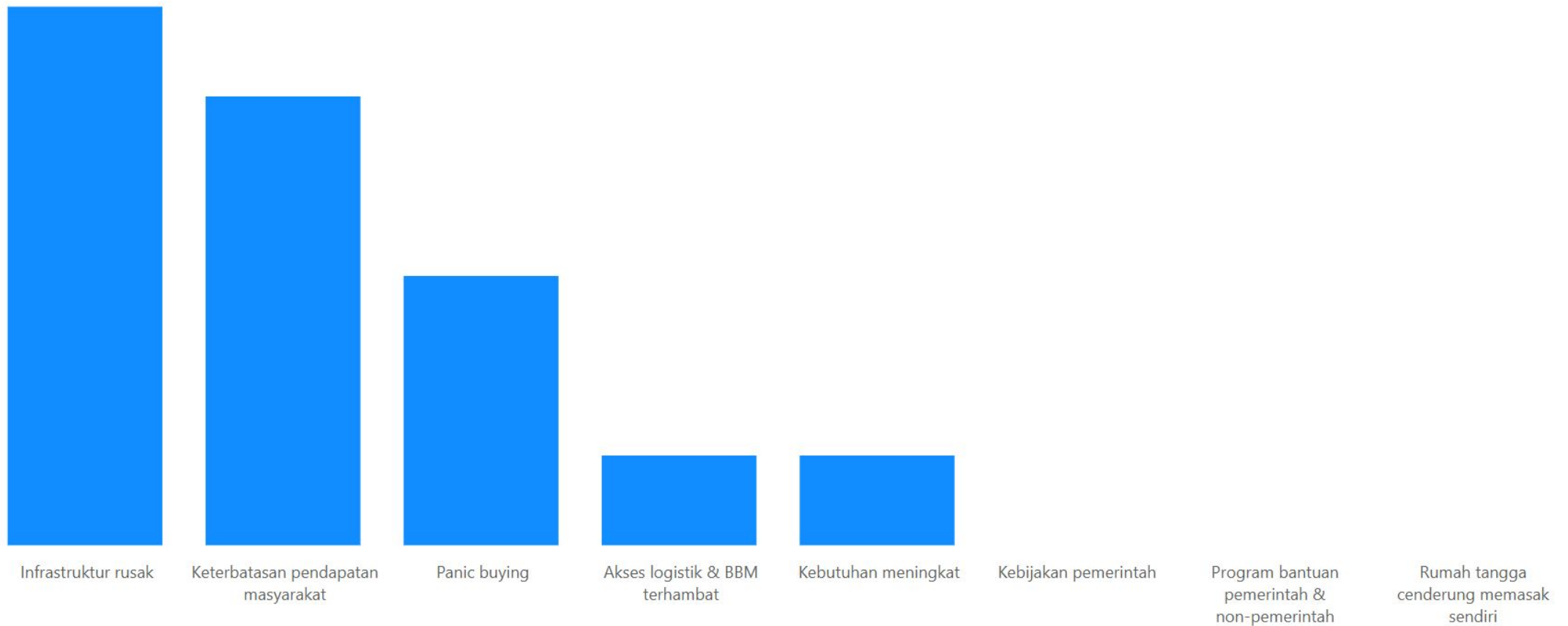


LAYANAN YANG DIKAJI

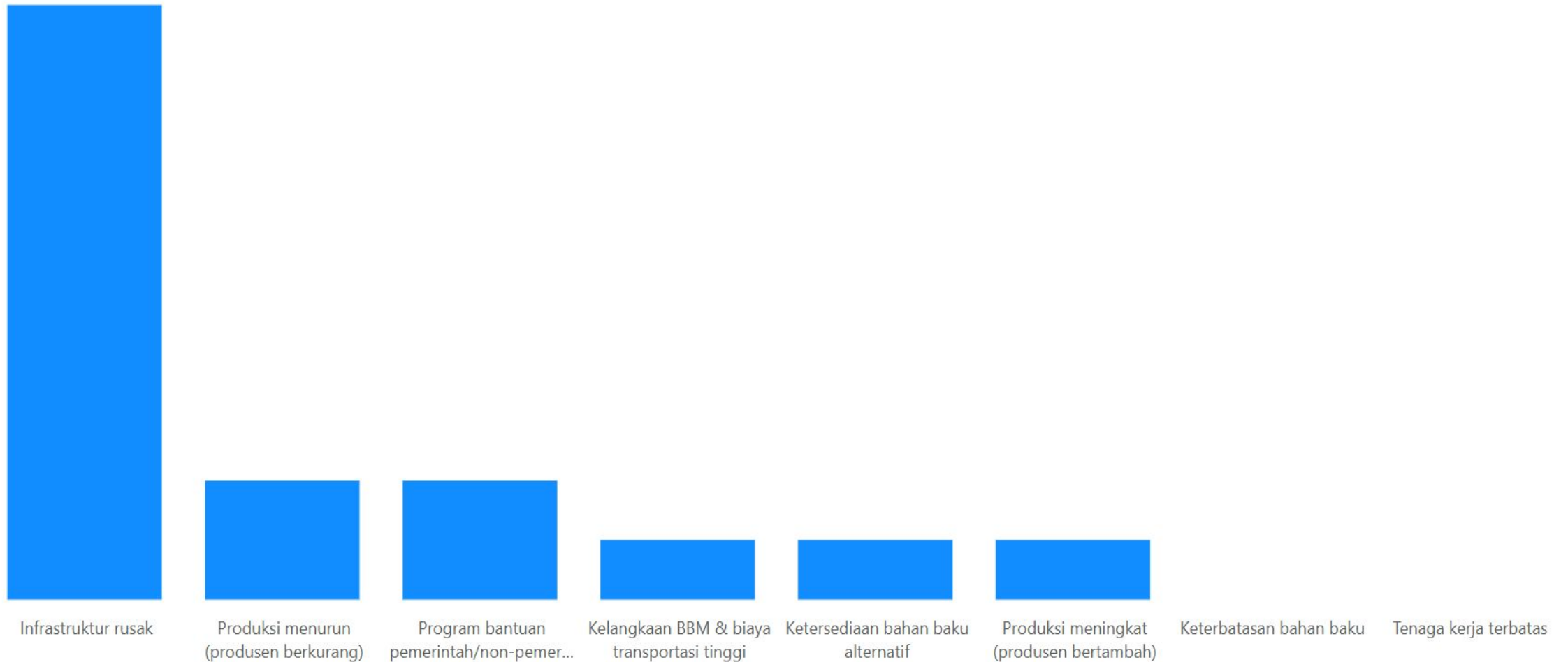


Komoditi	Instansi
Layanan Keuangan	Bank Aceh
Layanan Keuangan	Bank Nagari
Layanan Asuransi	BPJS Cabang Bireuen
Layanan Keuangan	BPR GEBU HARAPAN
Layanan Keuangan	BRI link zacky
Energi & Bahan Bakar	Pertamina Patraniaga Bidang Gas
Air Bersih	Perumda Air Minum Tirta Antokan
Air Bersih	PERUMDA AIR MINUM TIRTA PASE
Layanan Keuangan	Pos Indonesia
Energi & Bahan Bakar	SPBU Pertamina Kebun jambu

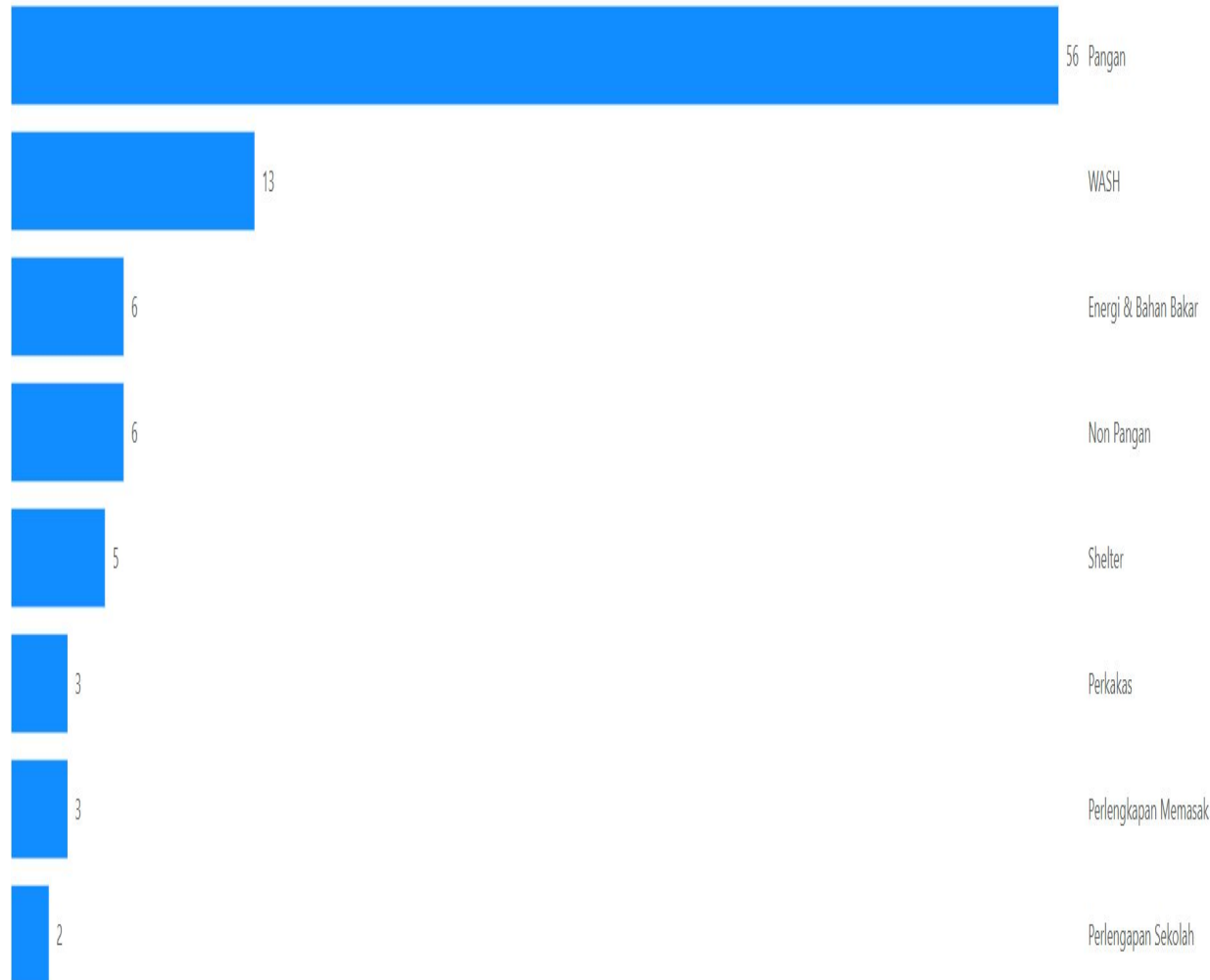
PENYEBAB TREND PENURUNAN PERMINTAAN LAYANAN



PENYEBAB TREND PENURUNAN KETERSEDIAAN LAYANAN

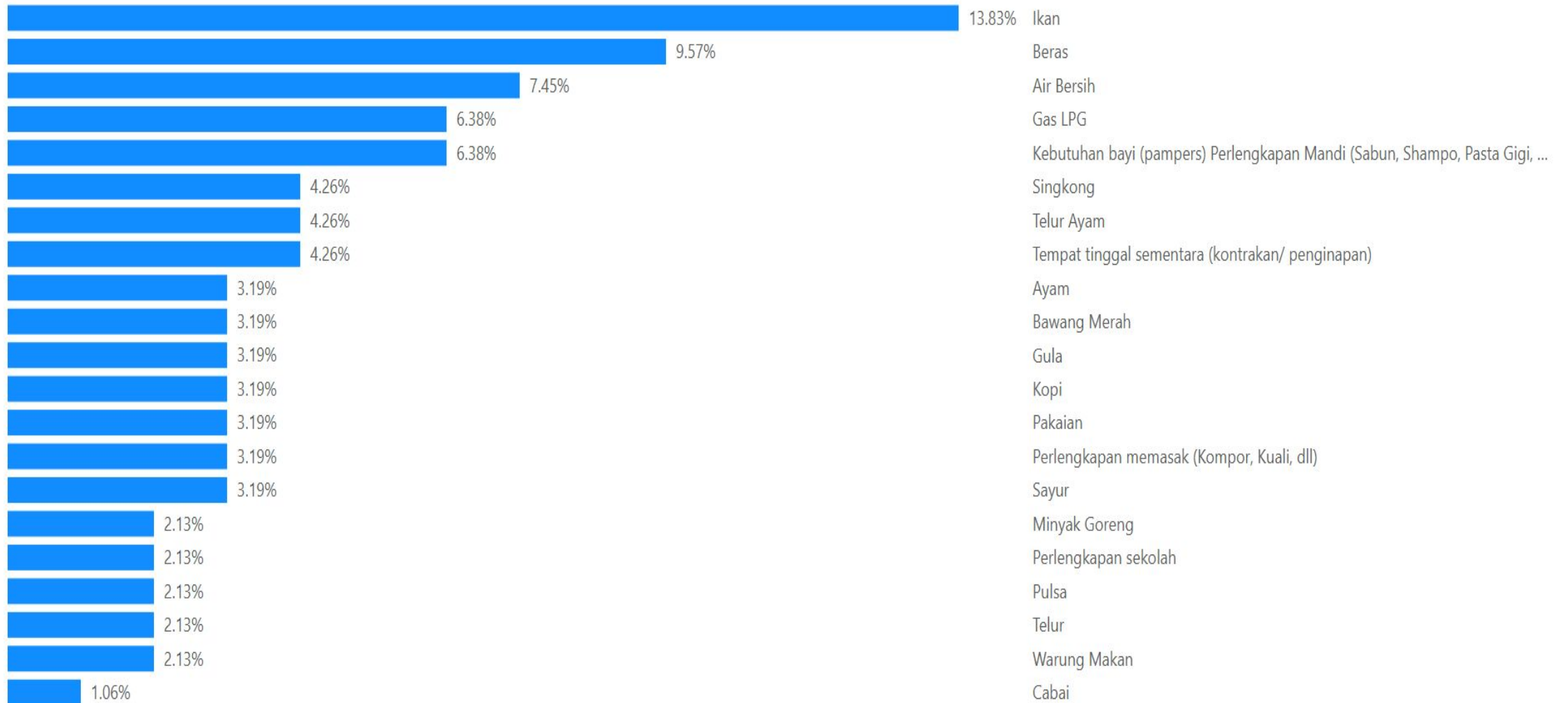


KAJIAN KOMODITI



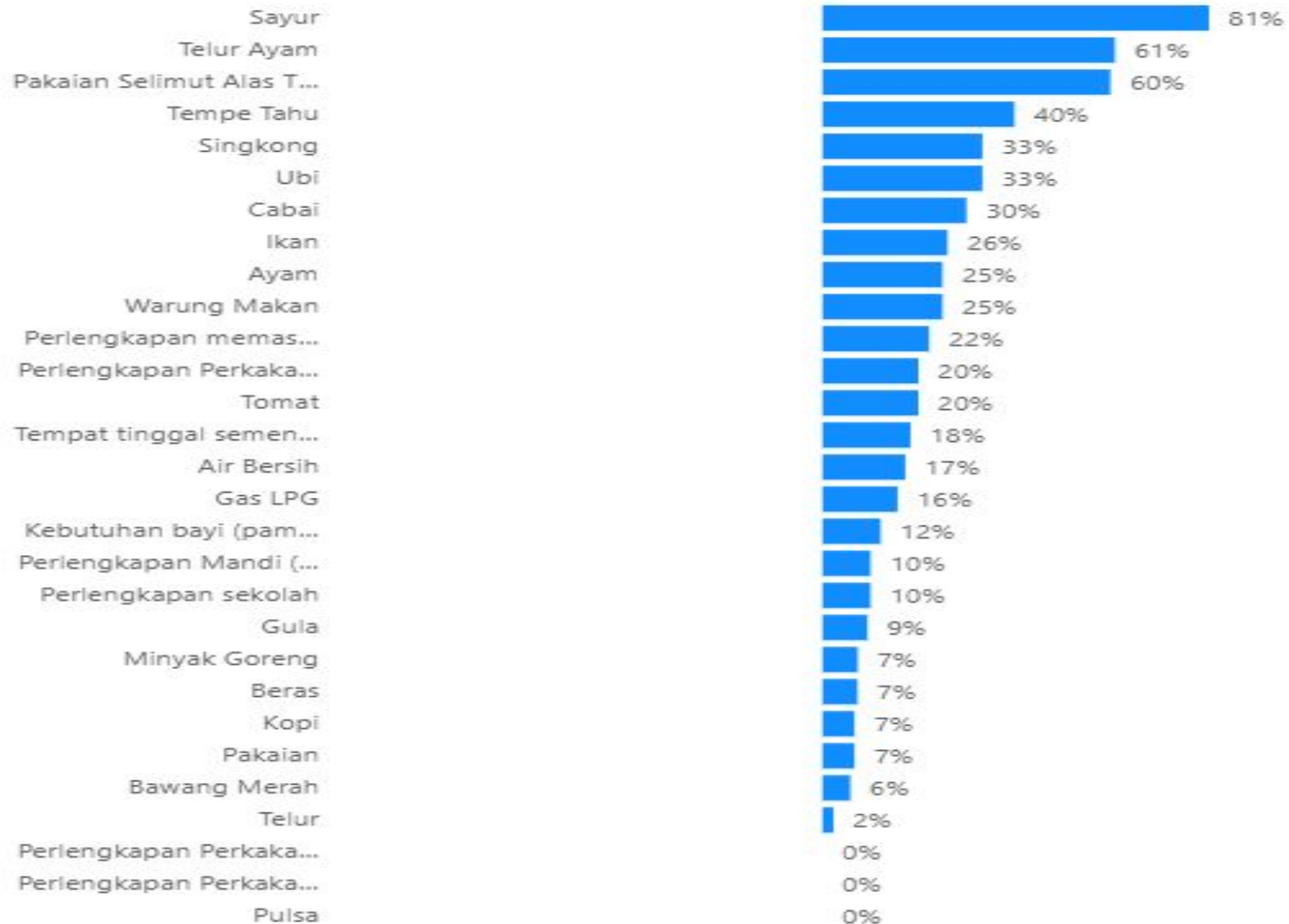
Asal Produk	Kategori	Detail Komoditi
Dalam kota	Pangan	Air Bersih
Dalam kota	WASH	Air Bersih
Dalam kota	Pangan	Ayam
Luar kota	Pangan	Ayam
Dalam kota	Pangan	Beras
Luar kota	Pangan	Beras
Dalam kota	Pangan	Cabai
Dalam kota	Energi & Bahan Bakar	Gas LPG
Dalam kota	Pangan	Gula
Dalam kota	Pangan	Ikan
Dalam kota	WASH	Kebutuhan bayi (pampers) Perlengkapan Mandi (Sabun, Shampo, Pasta Gigi, Sikat Gigi, Pembalut)
Dalam kota	Pangan	Kopi

JENIS KOMODITI

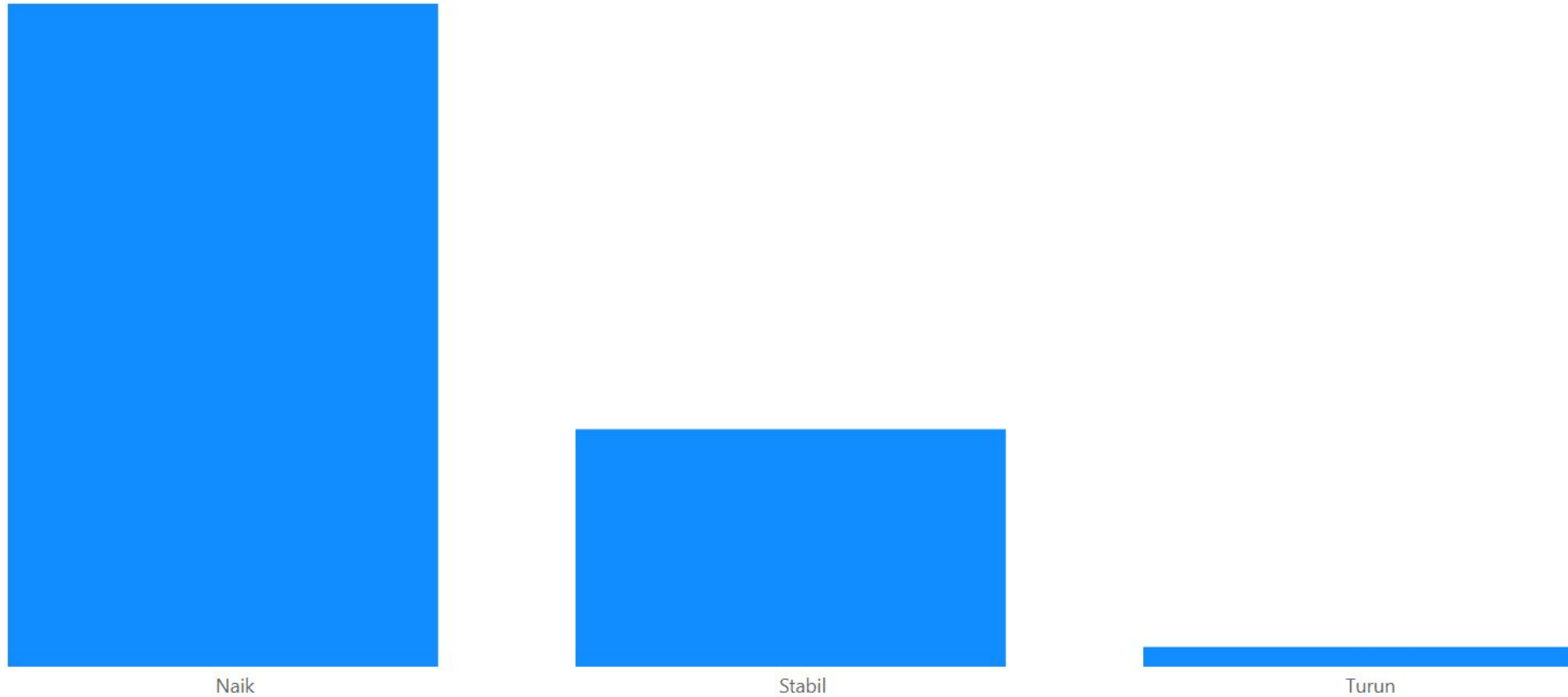


RATA-RATA PERUBAHAN HARGA BELI KOMODITAS

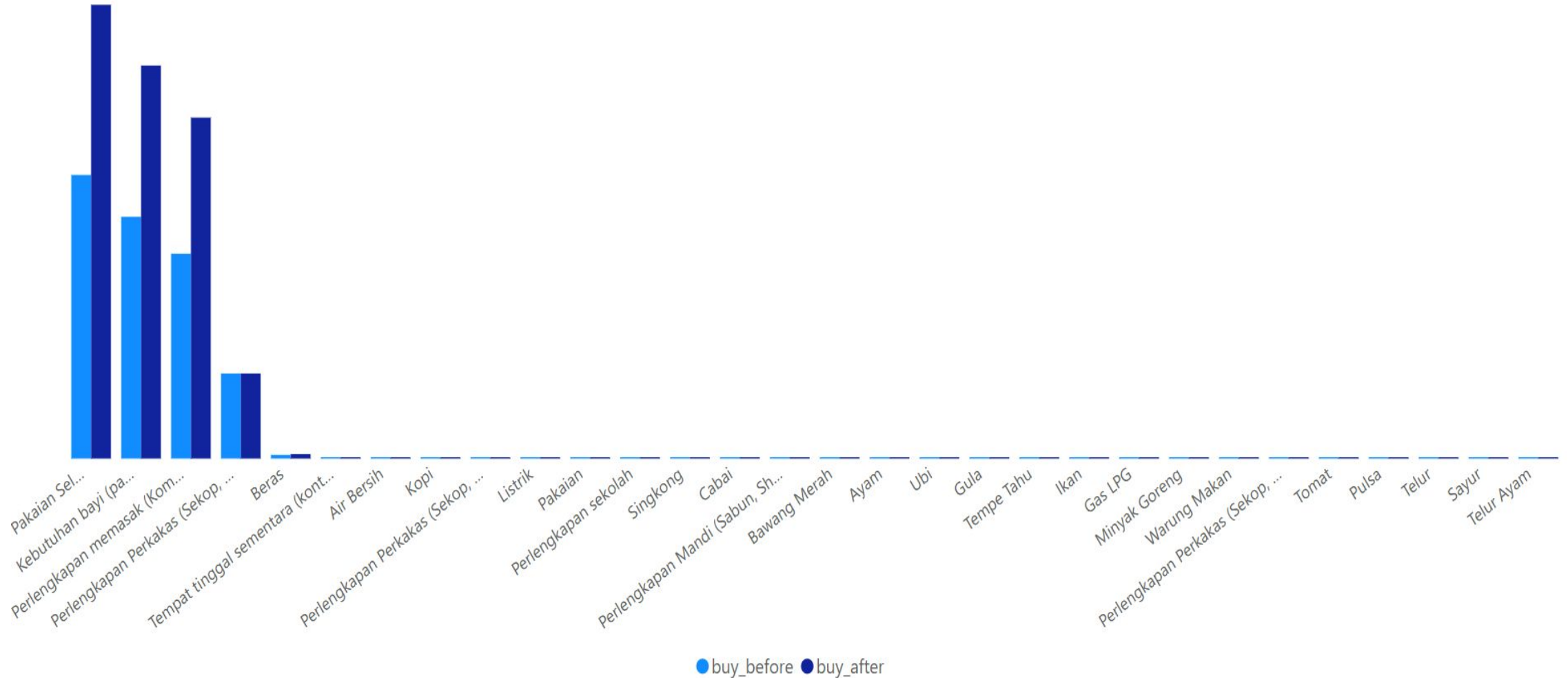
Rata-rata Perubahan Harga Beli (%) per Komoditas



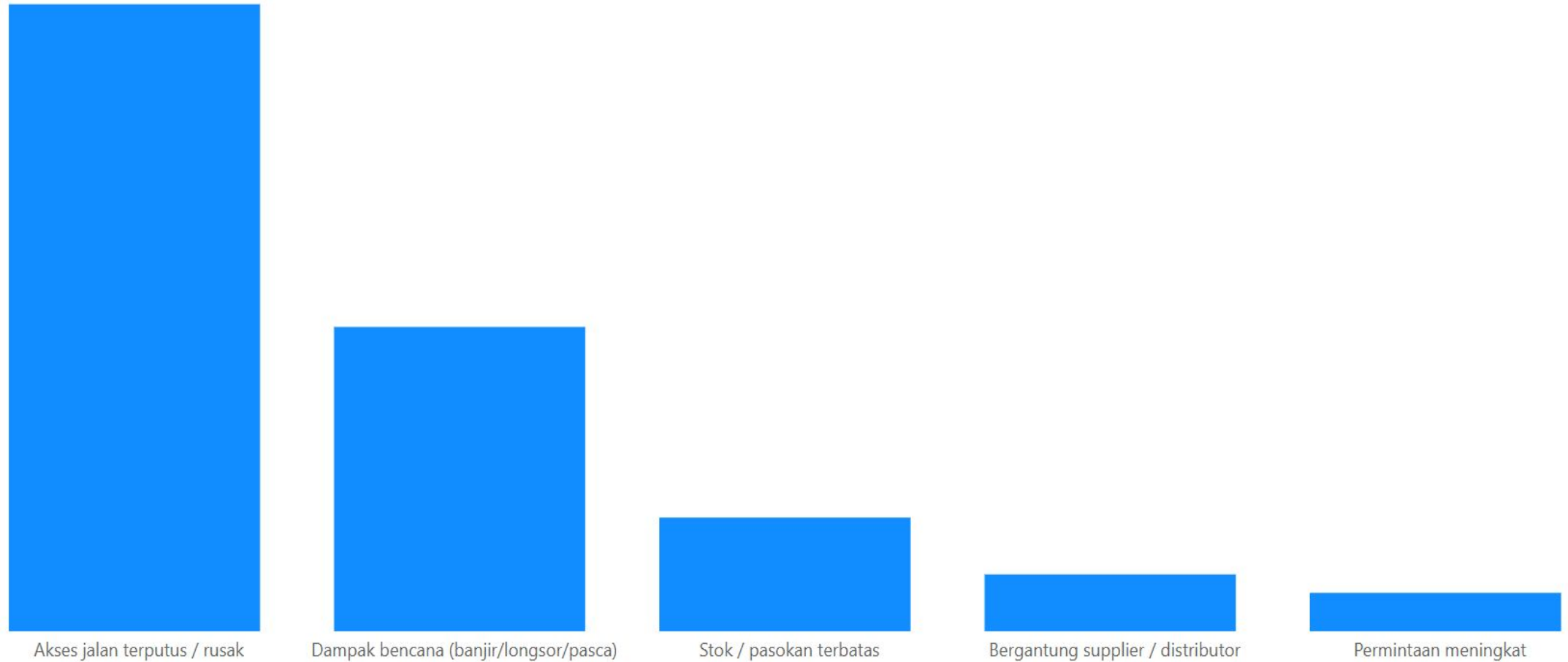
DISTRIBUSI PERUBAHAN HARGA BELI



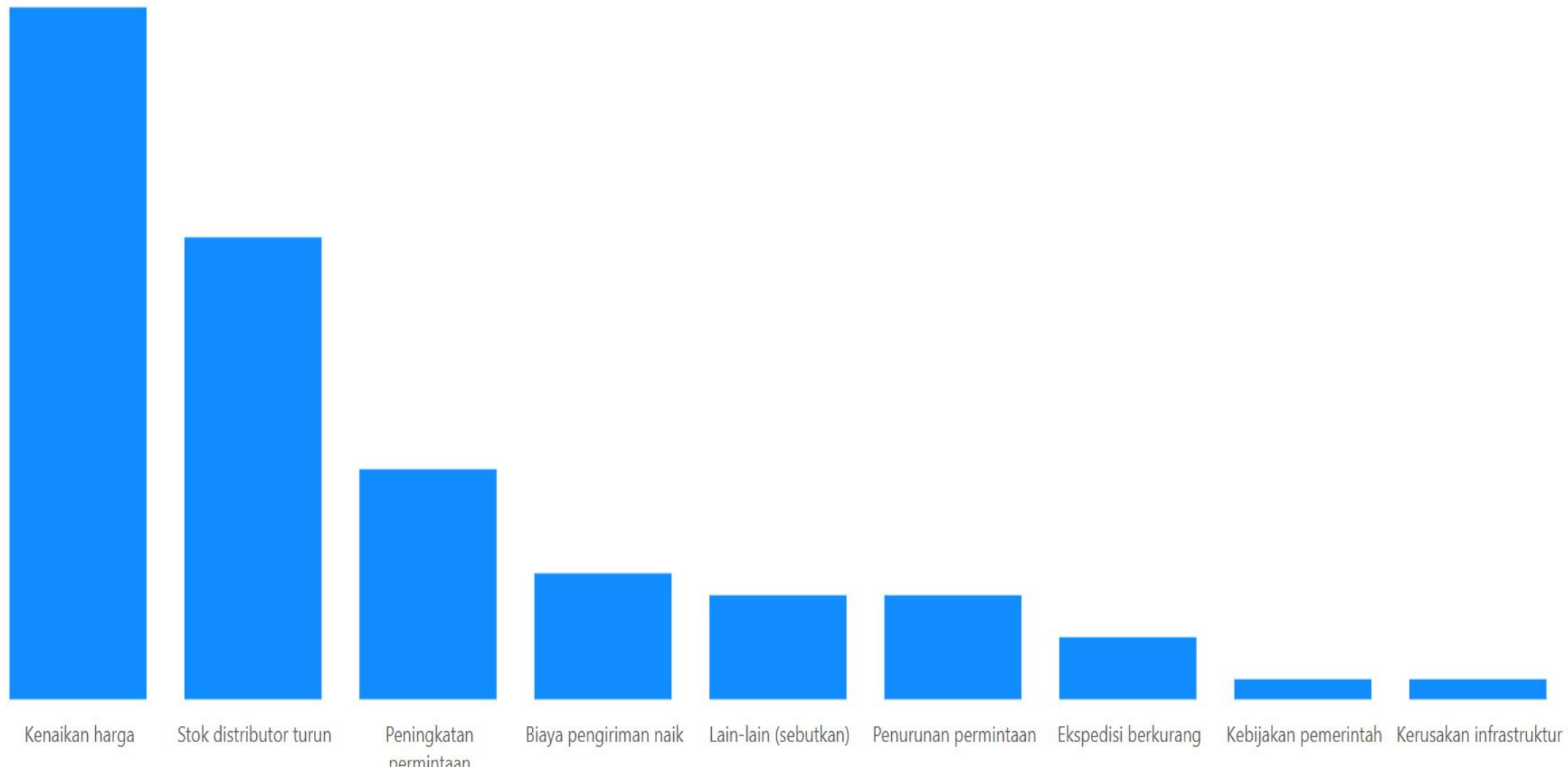
RATA-RATA HARGA BELI SEBELUM & SESUDAH BENCANA



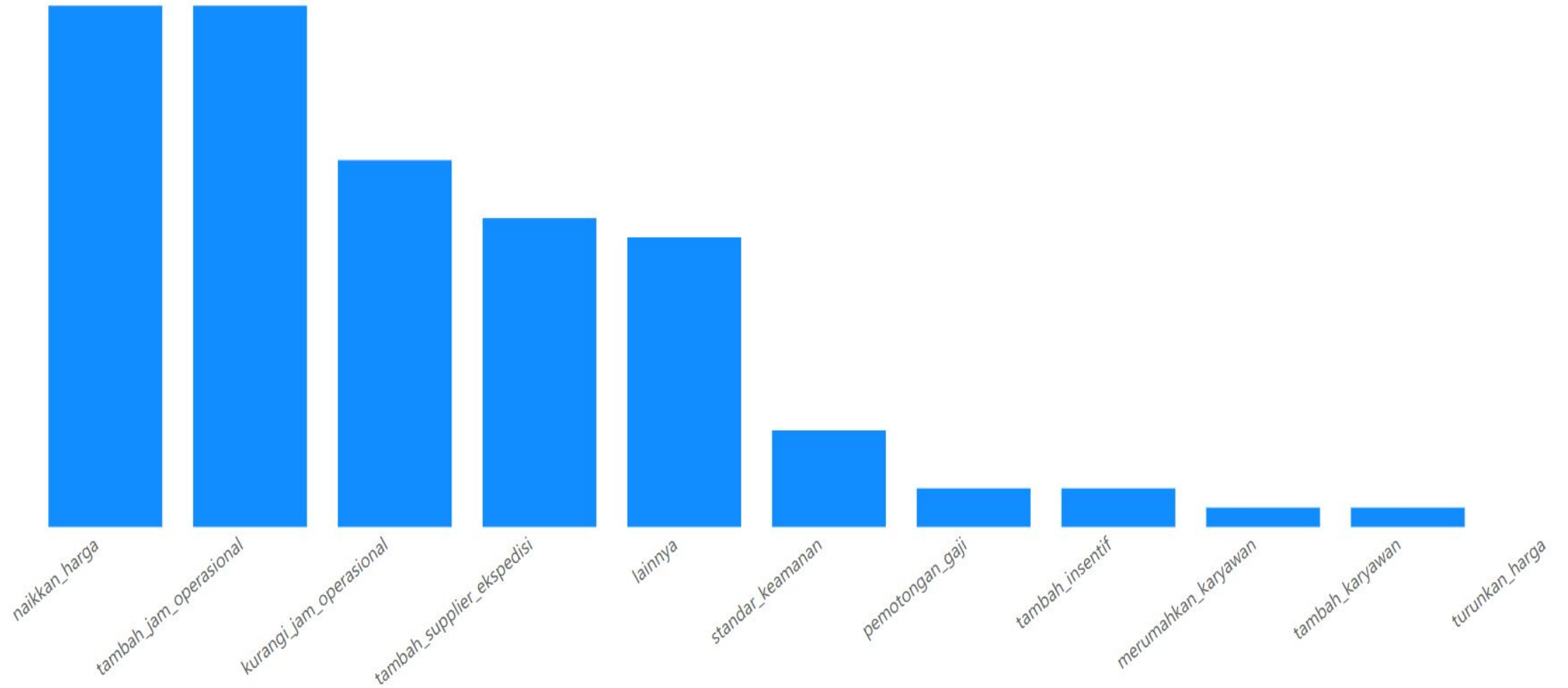
ALASAN PERUBAHAN HARGA JUAL



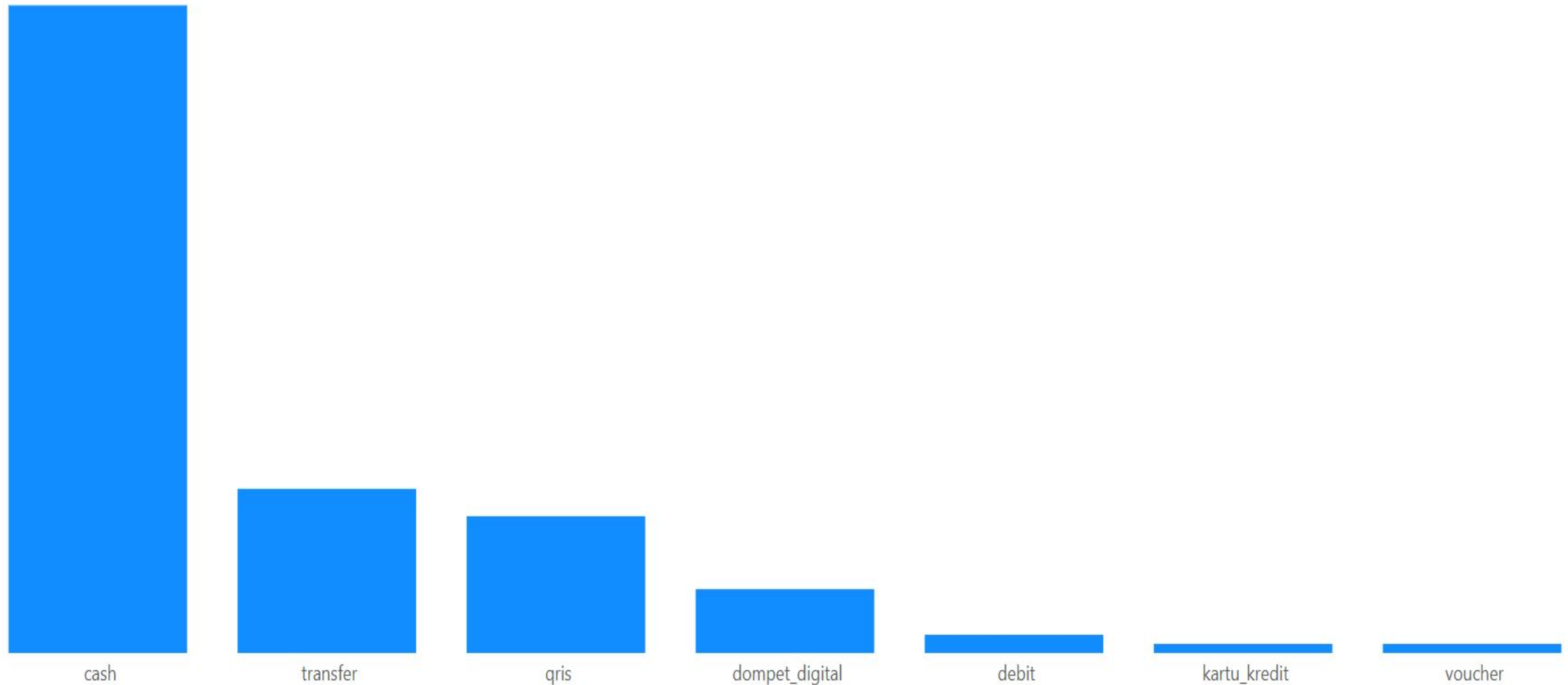
TANTANGAN YANG DIHADAPI PEDAGANG



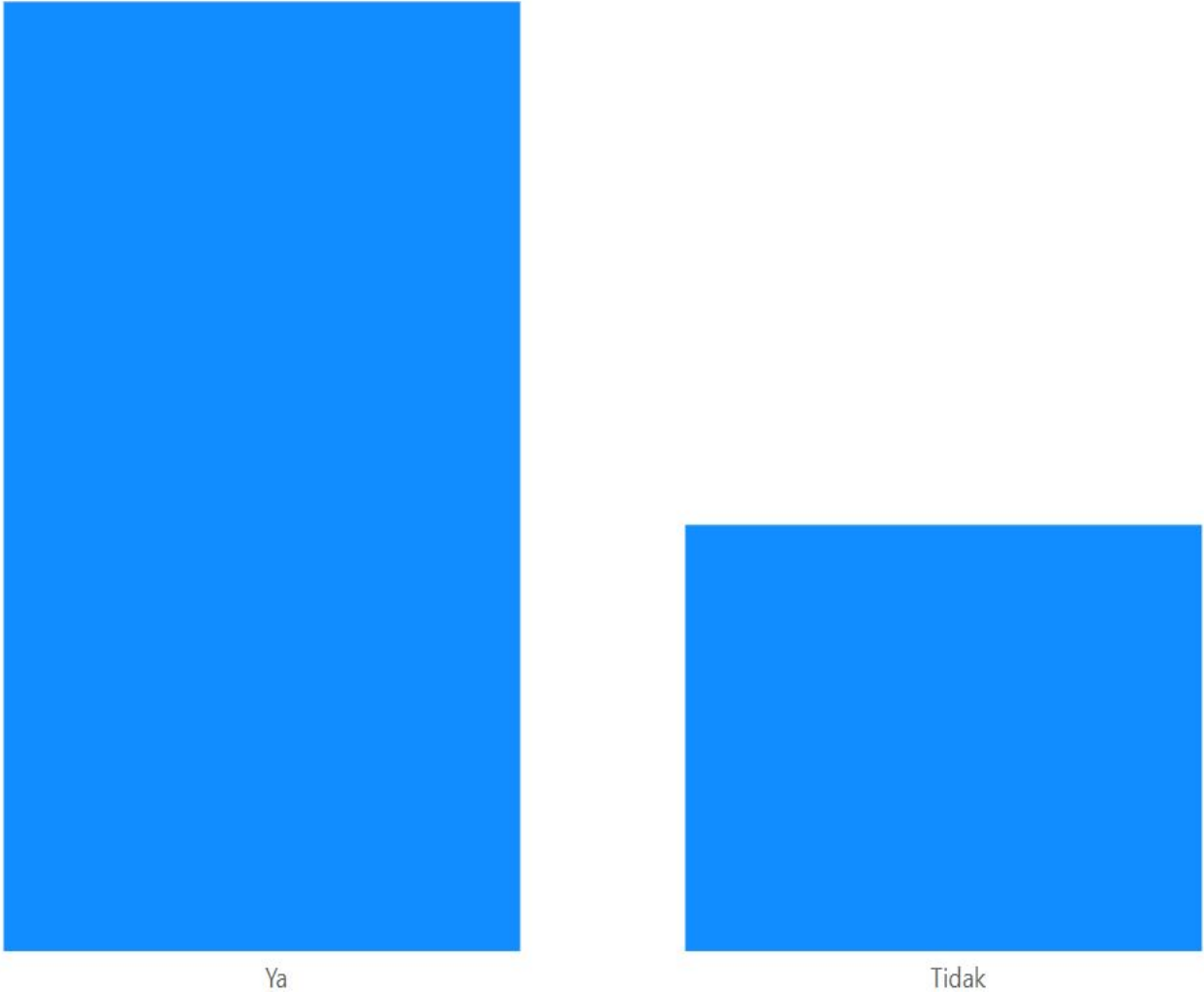
STRATEGI & PERUBAHAN PASCA BENCANA PENYEDIA LAYANAN & PEDAGANG



METODE PEMBAYARAN UNTUK TRANSAKSI



KESEDIAAN UNTUK KERJASAMA DENGAN CVA



Total respondent pedagang/ trader/ distributor sebanyak 87 dari 3 provinsi, dengan komoditas tertinggi adalah pangan/ bahan makanan sebanyak 55 respondent dengan **target pelanggan tertinggi adalah rumah tangga.**

Terdapat **kenaikan harga beli** dari trader dari pemasok, dan 3 komoditas yang mengalami perubahan harga beli adalah: pakaian, alas tidur, dan selimut, kebutuhan bayi dan perlengkapan mandi, perlengkapan perkakas, beras dan air. Hal ini terkonfirmasi dengan tantangan yang dihadapi oleh penjual adalah harga naik dan ketersediaan stock yang menurun.

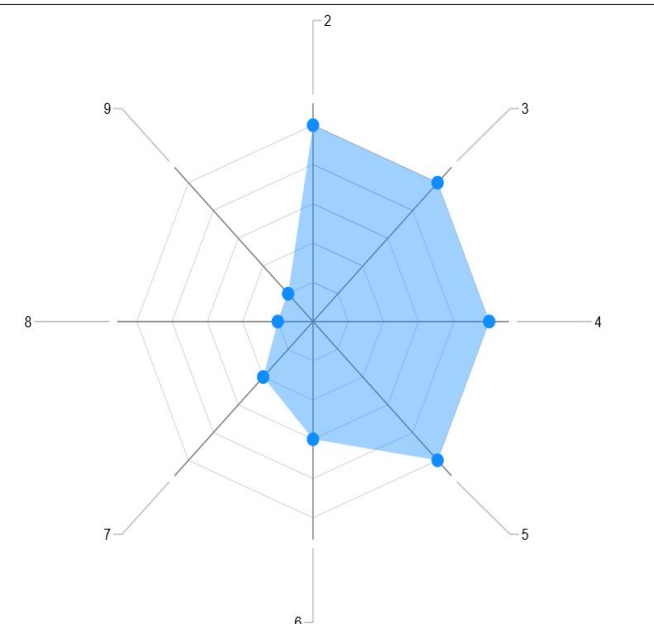
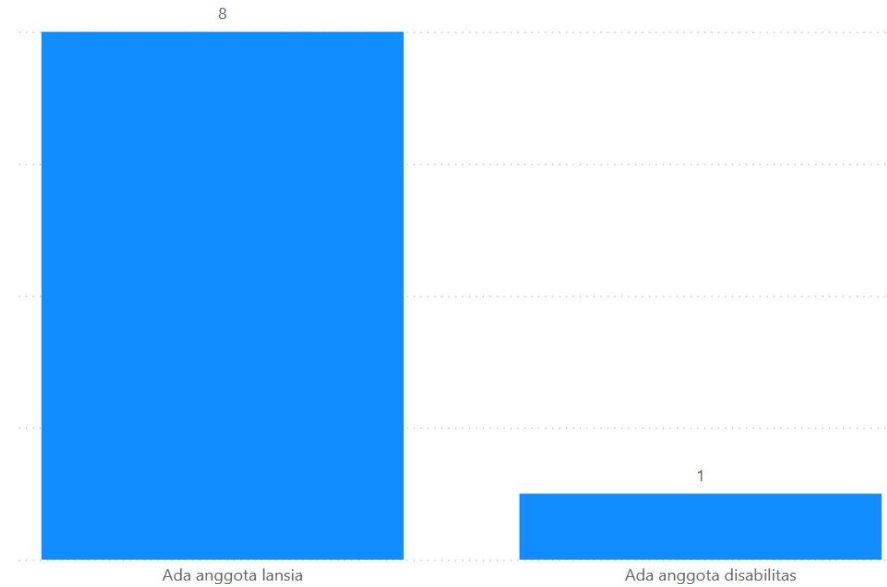
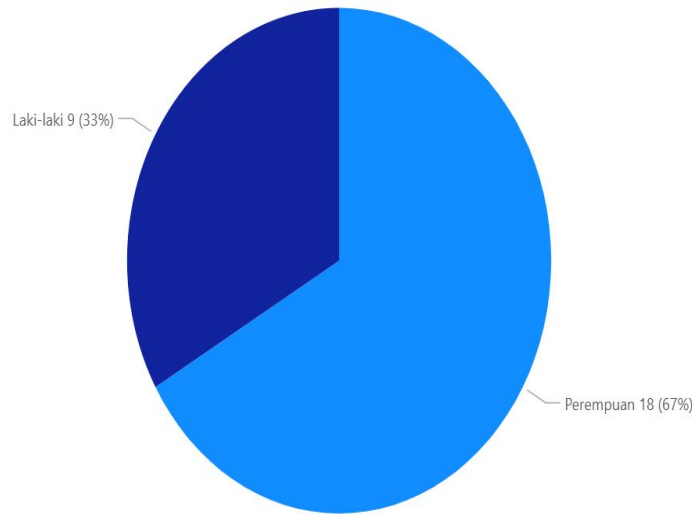
Hal ini **berdampak pada kenaikan harga jual** di beberapa komoditas, seperti alat perkakas, kebutuhan bayi & perlengkapan mandi, beras, kopi, dll. Hal ini dikarenakan akses jalan yang terputus.

Metode pembayaran mayoritas menerima cash dan bersedia terlibat dalam penyaluran bantuan menggunakan voucher.



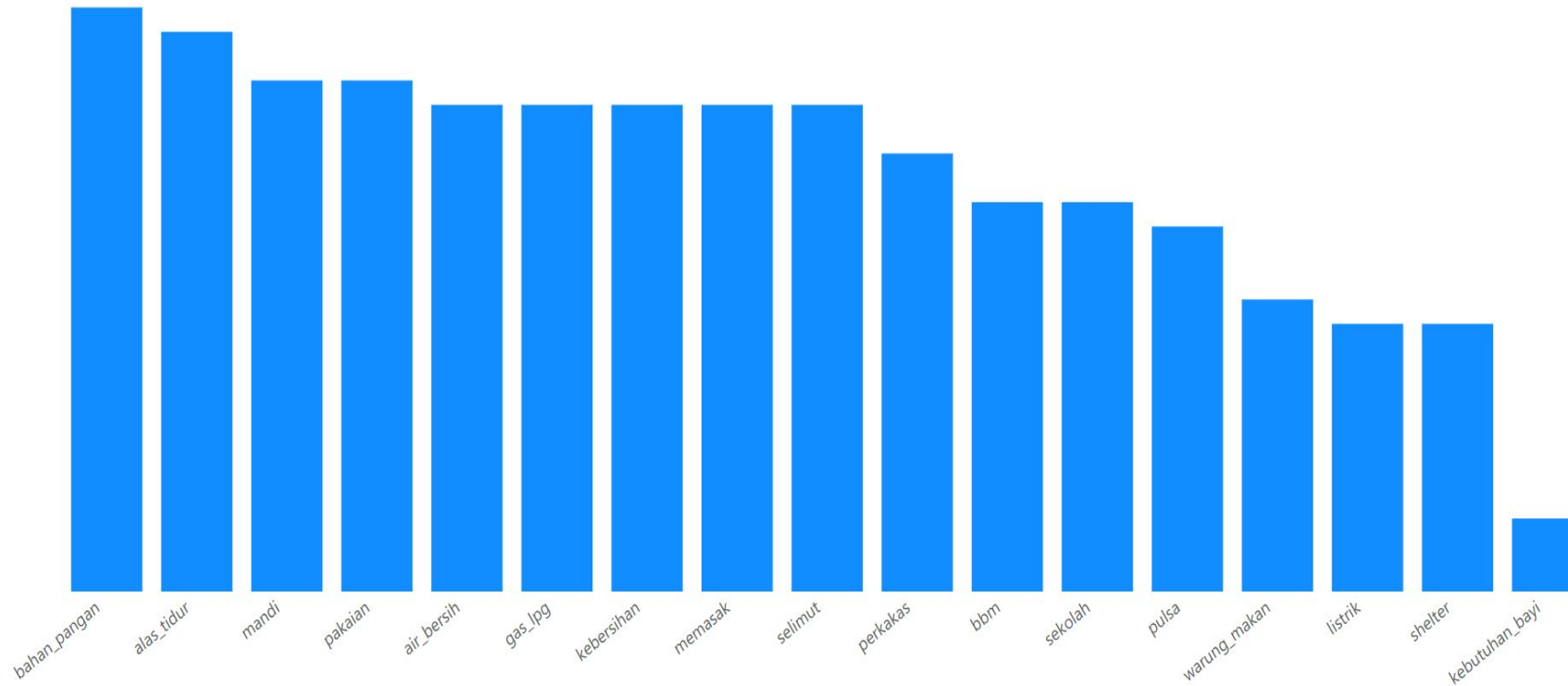
Respondent Rumah Tangga

DEMOGRAFI RESPONDEN RUMAH TANGGA



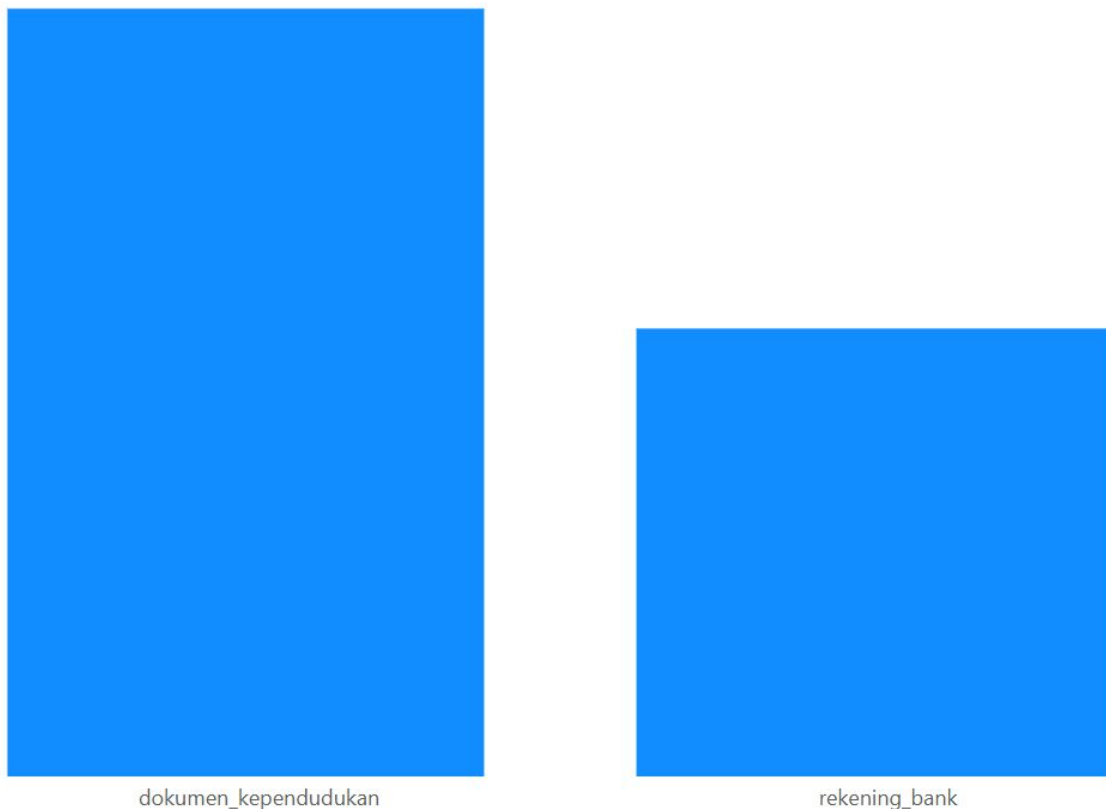
Total respondent rumah tangga yang di interview sebanyak 27 respondent, dimana terdapat 8 respondent yang memiliki anggota keluarga lansia dan 1 respondent memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas. Dari grafik, diketahui rata-rata anggota keluarga adalah 4,41.

PRIORITAS KEBUTUHAN 3 BULAN KEDEPAN



Dari total 27 respondent, terdapat 5 kebutuhan tertinggi yang menjadi prioritas masyarakat dalam 3 bulan kedepan yaitu: pangan/ bahan makanan, alas tidur, perlengkapan mandi & pakaian memiliki jumlah respondent yang sama, kemudian air bersih, gas lpg, peralatan kerbersihan dan selimut memiliki jumlah respondent yg sama, serta perkakas.

KETERSEDIAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

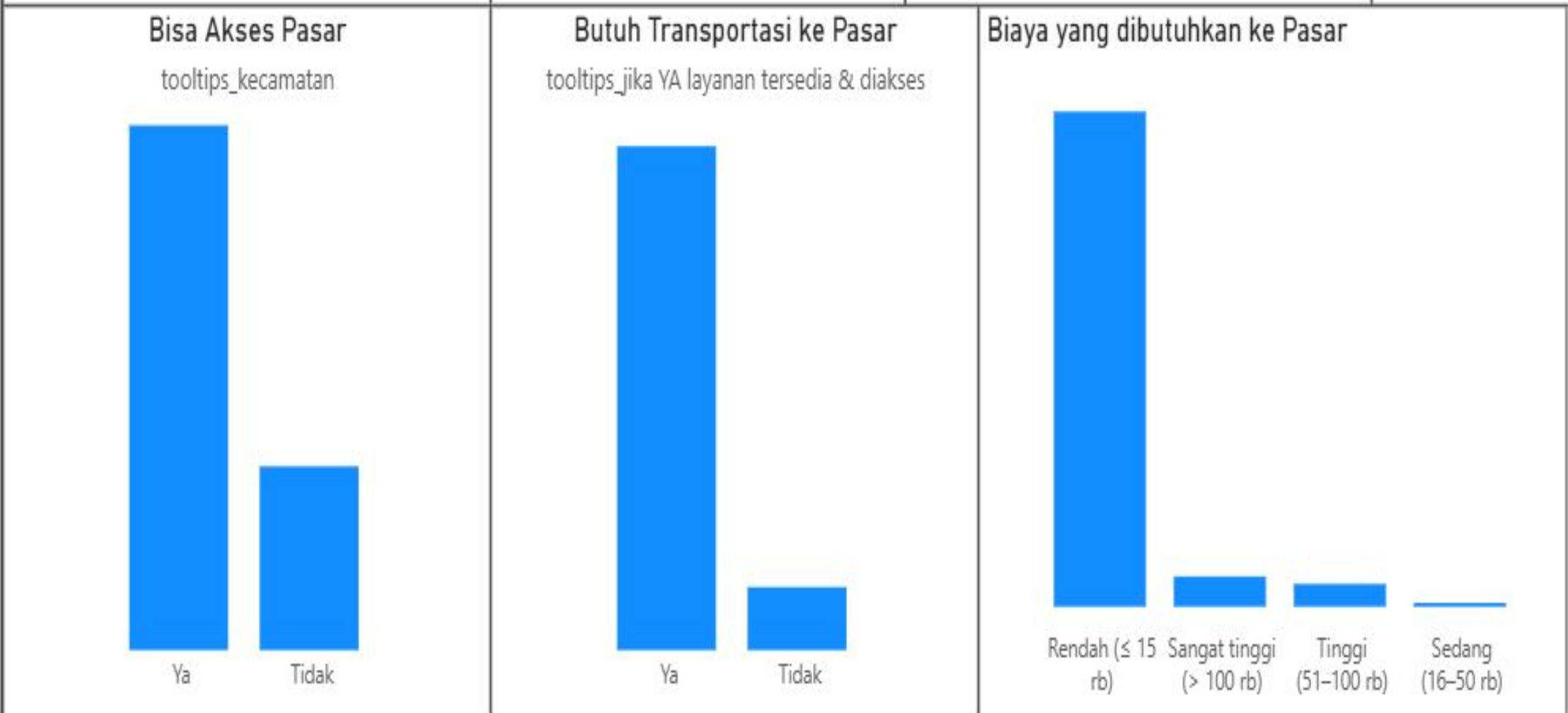


Dari total 24 responden, menyatakan memiliki dokumen kependudukan, dan 14 di antaranya memiliki rekening di bank. Berdasarkan hasil JMA, diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan pelayanan cetak ulang dokumen kependudukan tanpa harus membawa dokumen prasyarat seperti KTP, KK, atau akta. Kebijakan ini mempermudah proses distribusi bantuan non-tunai melalui fasilitas layanan lembaga keuangan, yang memerlukan dokumen kependudukan sebagai dasar pencairan.

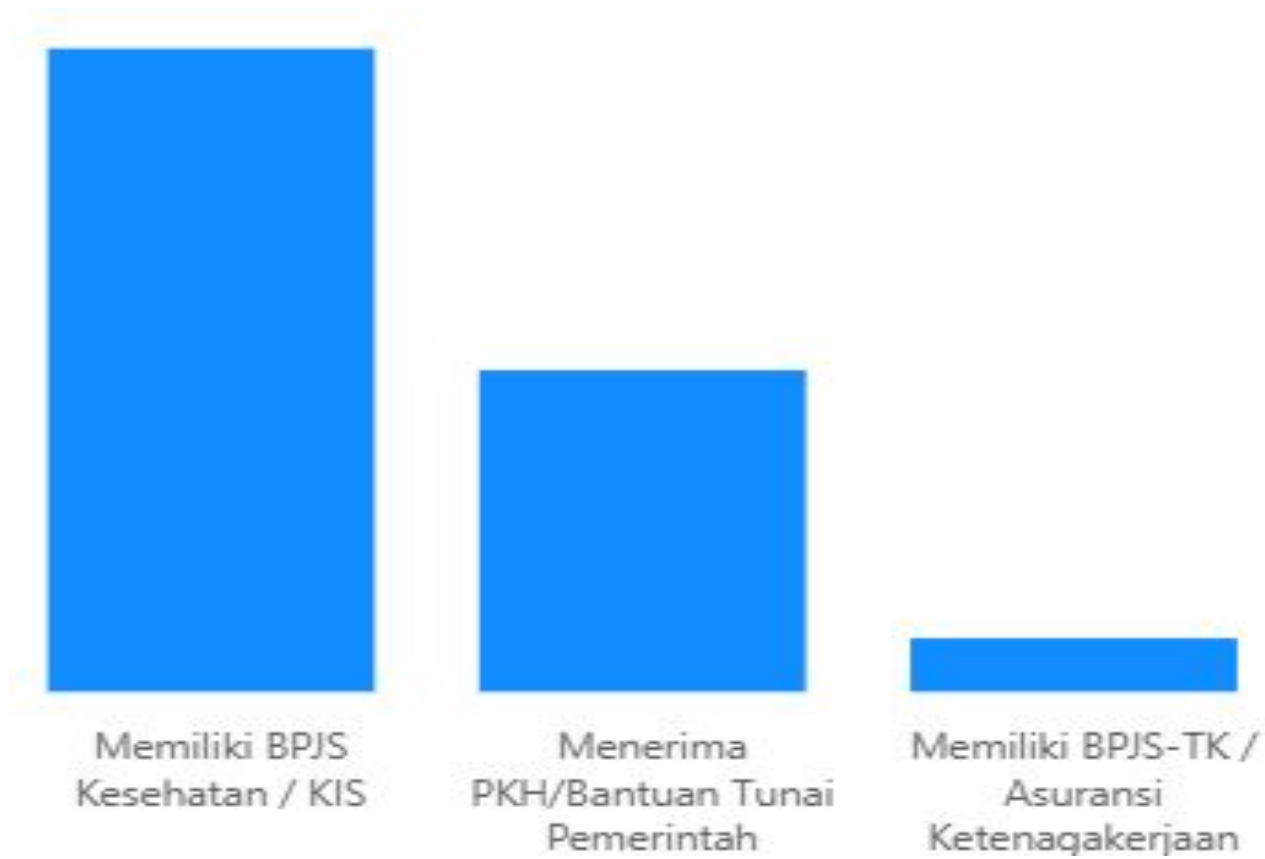
AKSES LAYANAN KEUANGAN



AKSES PASAR

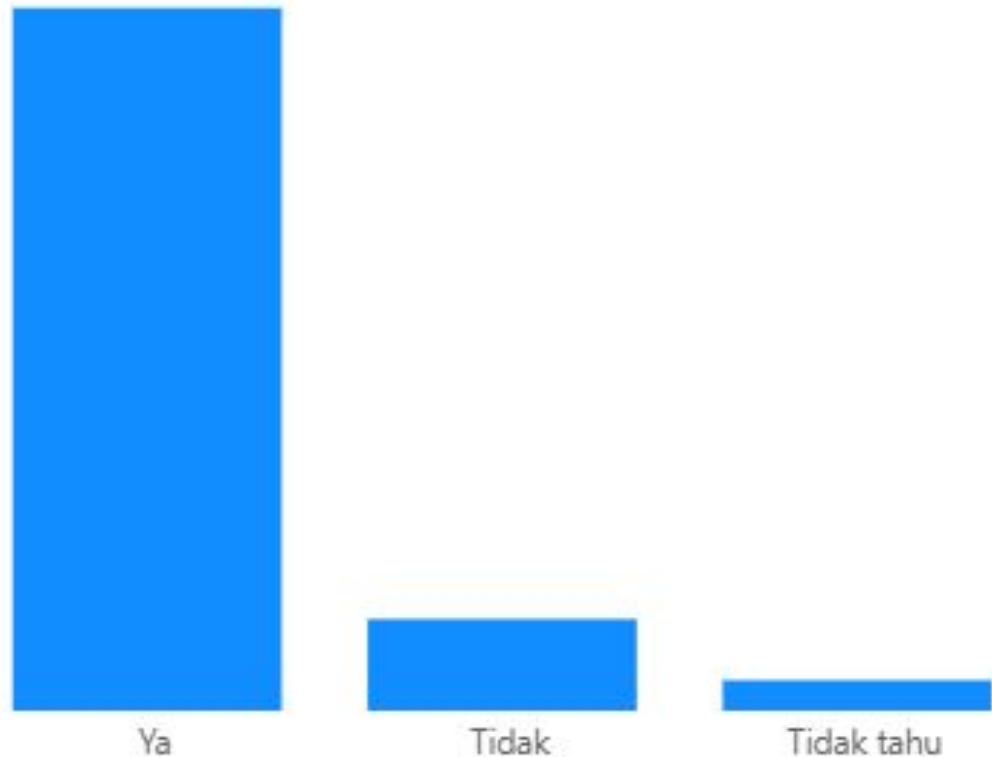


BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL YANG DIMILIKI



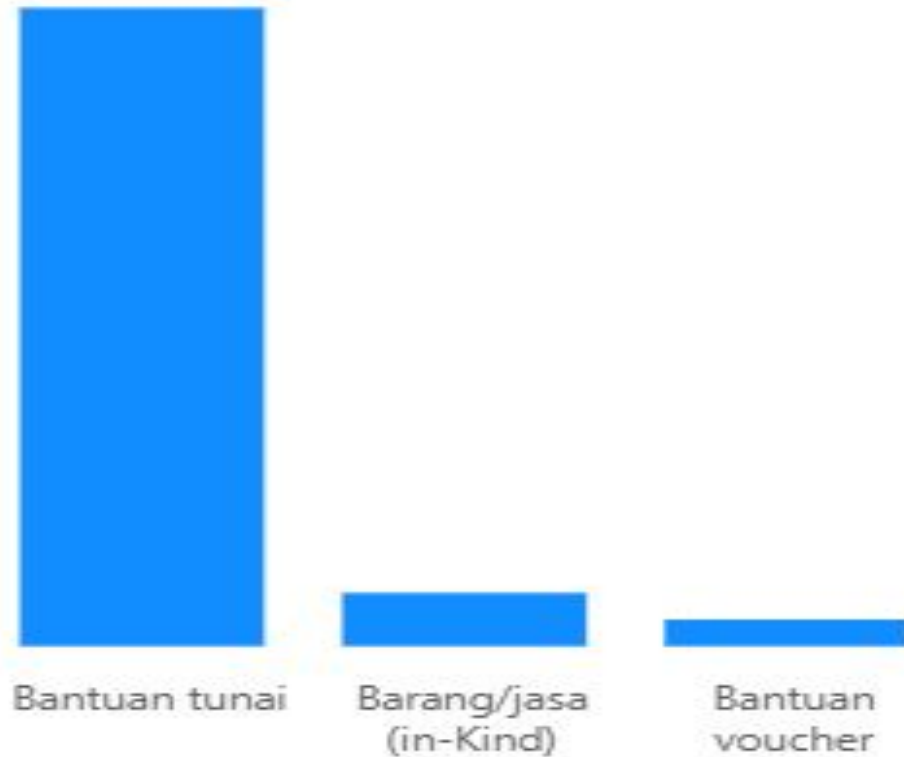
Terdapat 14 respondent yang menjadi penerima PKH, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat familiar dengan bantuan non tunai. Selain itu, terdapat 2 respondent yang memiliki jaminan sosial berupa BPJS-TK/ asuransi, hal ini menunjukkan perlu pelibatan lembaga penyedia perlindungan untuk ketenagakerjaan jika intervensi yang dilakukan adalah Cash for Work/ BaNTu Padat Karya.

RENCANA KEMBALI & MEMBERSIHKAN RUMAH



Sebanyak 23 responden menyatakan memiliki rencana untuk kembali dan membersihkan rumah mereka. Hasil ini memberikan gambaran bahwa intervensi Cash for Work berpotensi efektif dalam membantu masyarakat.

BANTUAN YANG DIHARAPKAN

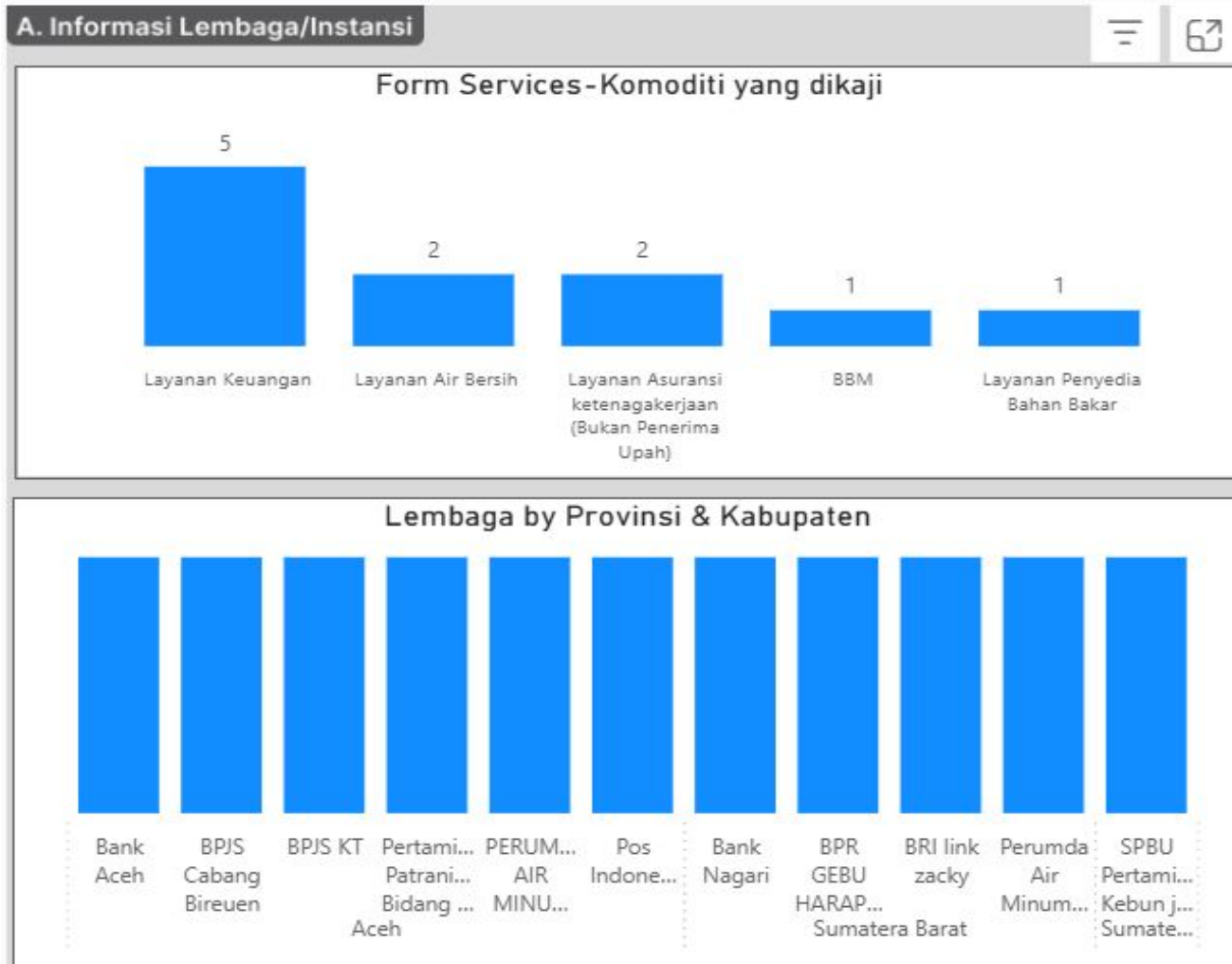


Secara keseluruhan, mayoritas responden lebih menyukai bantuan dalam bentuk non-tunai. Berdasarkan wilayah, di Sumatera Utara, preferensi terbagi 50:50 antara bantuan non-tunai dan bantuan berupa barang, sedangkan di Sumatera Barat seluruh responden menyatakan lebih menyukai bantuan non-tunai.



Respondent Instansi Penyedia Layanan

Informasi Instansi Penyedia Layanan

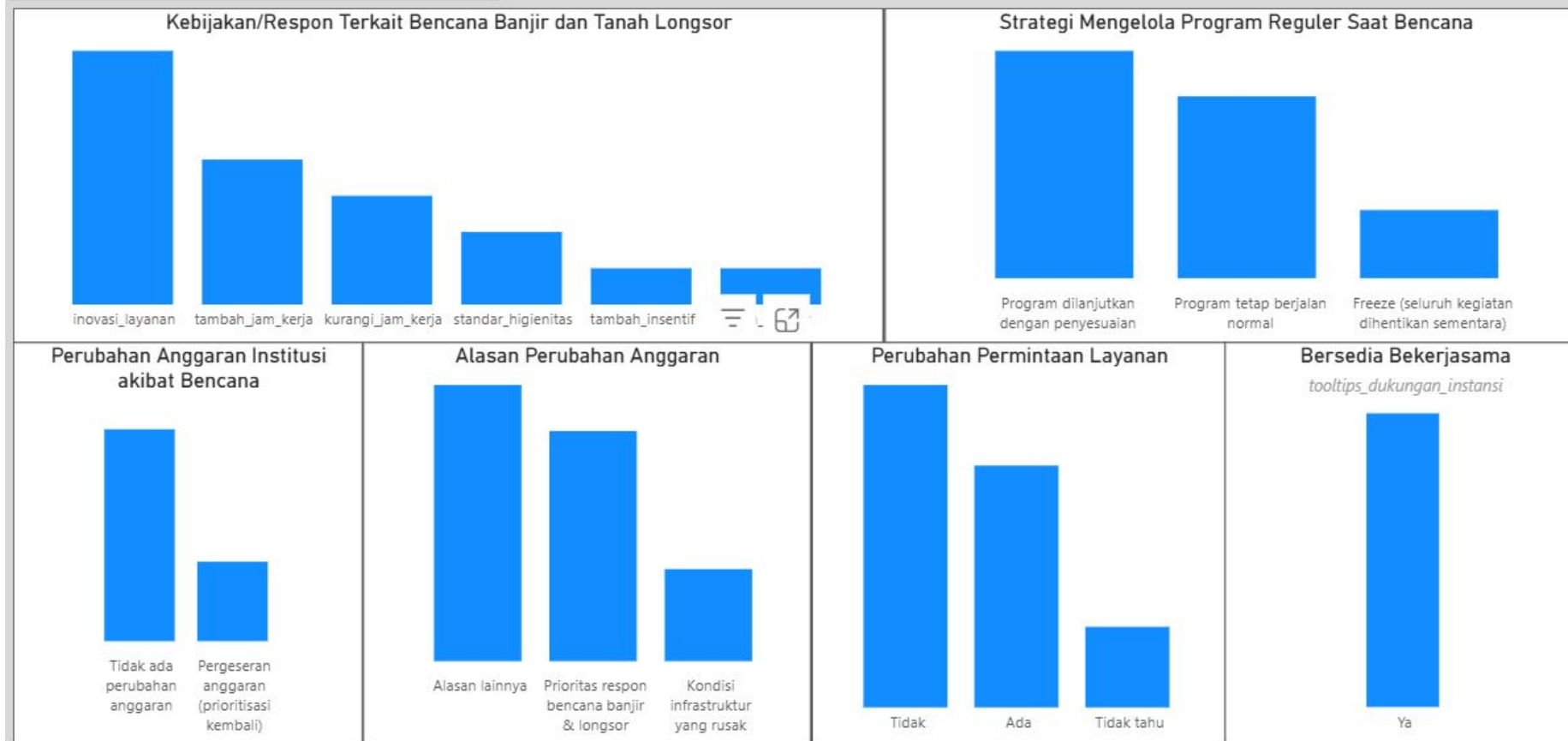


Market assessment juga dilakukan kepada instansi penyedia layanan, dengan mayoritas respondent adalah lembaga keuangan, baik berupa Bank BUMD, BUMN, maupun swasta, Kantor Pos, dan layanan keuangan berbasis agen tersedia.

Respondent BPJS-TK memberikan informasi bahwa proses kerjasama dapat dilakukan dengan cabang maupun unit, dan proses pembuatan PKS kurang lebih 1 minggu.

Kebijakan/ Respon Instansi Penyedia Layanan merespon situasi bencana

D.E. Kebijakan/Respon Terkait Bencana & Layanan Jasa

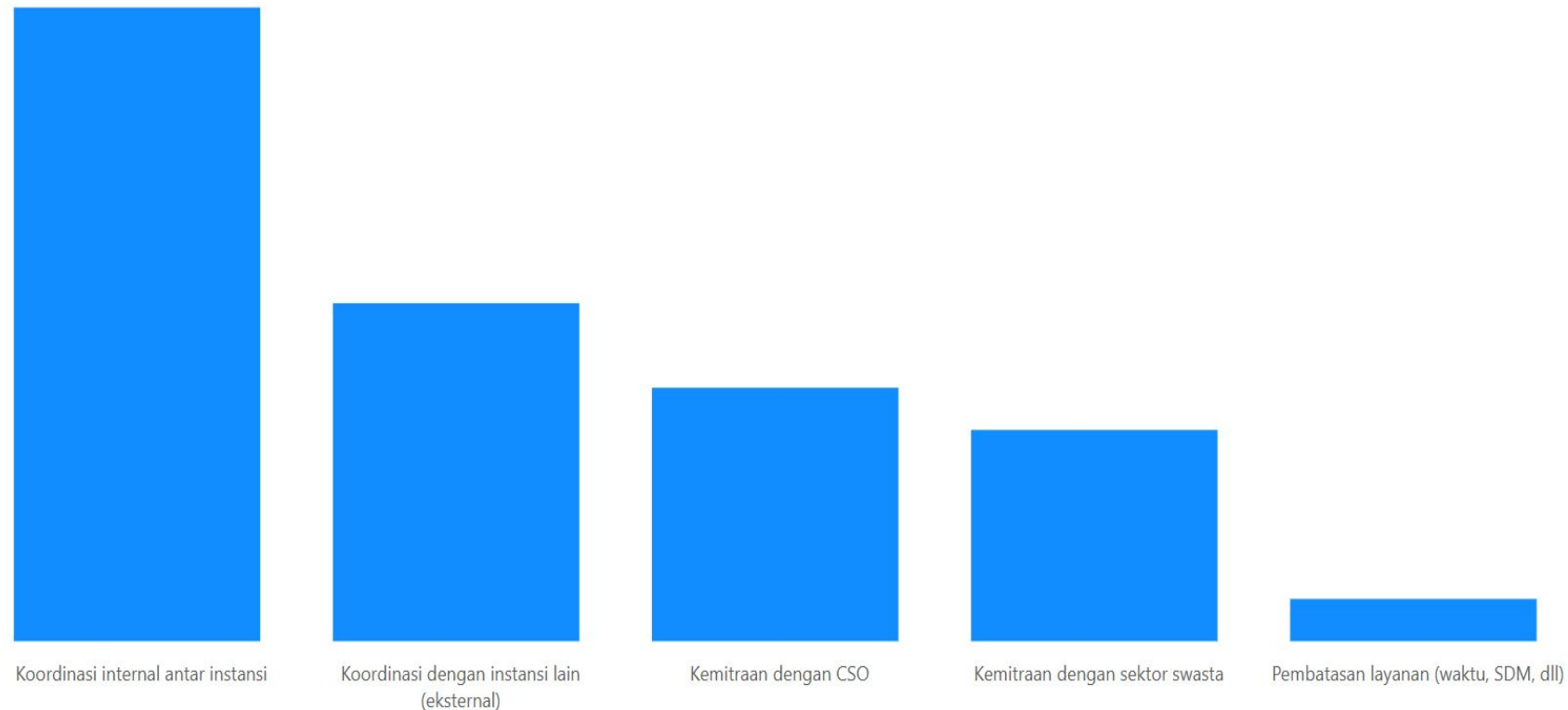


Terdapat **inovasi layanan** yang diberikan dan juga tambahan jam kerja untuk melayani kebutuhan masyarakat yg dilakukan oleh penyedia layanan. Perubahan permintaan layanan relatif responden menjawab tidak ada dan program dilanjutkan dengan penyesuaian. Mayoritas repondent menjawab **bersedia untuk bekerjasama** dalam menyediakan layanan untuk bantuan respon.



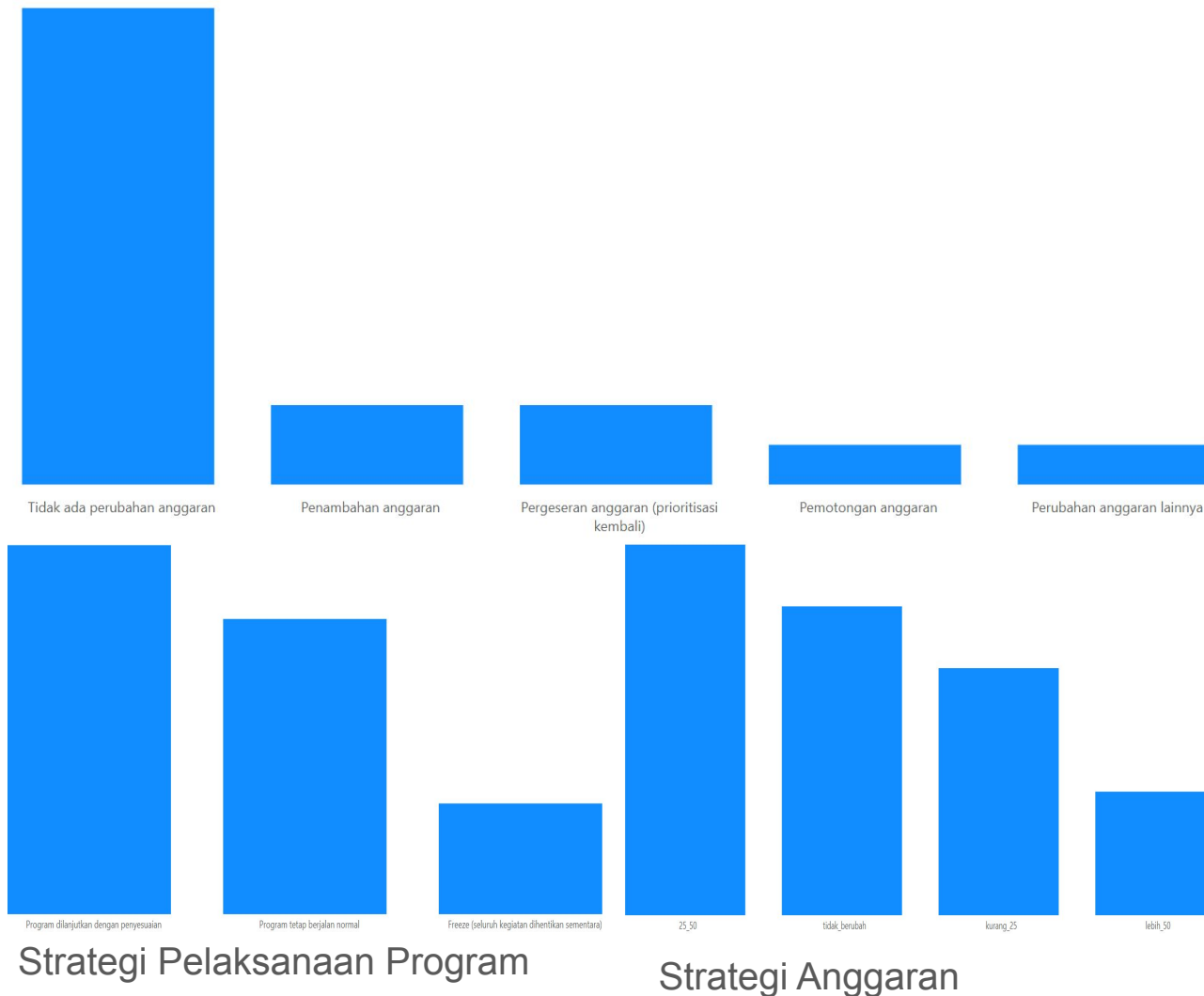
Respondent Pemerintah

KEBIJAKAN DAN RESPON PEMERINTAH TERKAIT BENCANA



Pemerintah memperkuat koordinasi internal antar instansi untuk membantu masyarakat dalam respon bencana.

STRATEGI PROGRAM PEMERINTAH



Mayoritas respondent instansi pemerintah menyatakan tidak ada perubahan pada pengelolaan program, tetap dilanjutkan dengan penyesuaian. Hal ini juga sejalan dengan tidak adanya perubahan anggaran. Beberapa instansi pemerintah seperti dinas kependudukan dan catatan sipil menyampaikan bahwa menggunakan alokasi dana darurat/ biaya tidak terduga untuk pelayanan ke lokasi bencana.

KESIMPULAN

- Pasar di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh menunjukkan fungsi yang **cukup** untuk mendukung respons berbasis pasar, dengan tingkat gangguan tertinggi di Aceh pada fase awal.
- **CVA direkomendasikan sebagai modalitas utama**, dengan pendekatan bertahap dan kontekstual per provinsi.
- Pemantauan pasar berkelanjutan (Joint Market Monitoring) penting untuk mengantisipasi fluktuasi harga dan risiko gangguan terhadap pasar.
- Pendekatan kolaboratif lintas sektor (pemerintah, swasta, dan organisasi kemanusiaan) diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar dan memastikan kegiatan inklusif terutama keterlibatan kelompok rentan dan disabilitas.

INTERVENSI PEMERINTAH

1. BPNT/Sembako: ±Rp200.000/KK/bulan (pangan).
2. PKH (bila ada): bersifat bersyarat dan tidak spesifik darurat.
3. Padat Karya Tunai Desa (Dana Desa):
 - a. Prinsip PKTD: ≥50% anggaran kegiatan untuk upah (Permendesa PDTT). Rata-rata upah harian PKTD (Sumatra): Rp85.000–Rp120.000/hari
4. Bantuan logistik BNPB/daerah: terbatas waktu dan cakupan.
 - a. Dana Tunggu Hunian (DTH) : Rp. 600.000/bulan/KK selama 6 bulan (dibayar dimuka 3 bulan pertama)
5. Bantuan Kemensos untuk:
 - a. Meninggal Dunia (ahli waris) Rp.15.000.000, Luka Berat Rp. 5000.000 (tali asih)
 - b. Bantuan Alat-alat Dapur dan Perabotan Rp.3.000.000
 - c. Bantuan Pemberdayaan &Pemulihan ekonomi Rp. 5.000.000 (Huntap&Huntara)
 - d. **Jaminan Hidup (jadup) Rp 15.000/ hari atau setara dengan Rp 450. 000/ bulan**
(sumber: [Kemensos terus salurkan logistik dan pemulihan pascabencana Sumatera - ANTARA News](#))

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA #KEMENSOS SELALU ADA

Bantuan Pascabencana Sumatra dari Pemerintah

Disalurkan oleh Kementerian Sosial untuk warga terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

- 1 Isian Perabot Rumah (Hunian Tetap/Hunian Sementara)**
Rp 3 juta/keluarga
- 2 Dukungan Pemberdayaan Ekonomi**
Rp 5 juta/keluarga
- 3 Dukungan Jaminan Hidup Sementara**
Diberikan pada masa pemulihan di hunian sementara & hunian tetap
Penyesuaian Jadup:
 - Standar lama (2020): Rp10.000/orang/hari selama 90 hari (3 bulan)
 - Diusulkan naik, menyesuaikan harga dan kebutuhan hidup saat ini
 - Usulan disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM)
 - Kemenko PMK, Rabu (17/12)
- 4 Santunan Korban Meninggal Dunia**
Rp 15 juta/korban
- Santunan Korban Luka Berat**
Rp 5 juta/korban

Semua Penyaluran dilakukan bertahap, berdasarkan → asesmen Pemda & BNPB

kemensos.go.id

BANTUAN PASCABENCANA SUMATERA DARI KEMENSOS

13,4 juta / keluarga

Jika dalam 1 keluarga terdapat 4 orang, dengan asumsi tinggal di hunjara selama 3 bulan.

Dukungan Tinggal di Hunian Sementara

- 1 Isian Rumah (saat di hunjara/hunjap)**
diberikan secara tunai untuk membeli kebutuhan perabotan rumah
Rp. 3 juta / keluarga
- 2 Bantuan Jaminan Hidup (Jadup)**
sebagai dukungan pemenuhan lauk-pauk saat tinggal di hunjara
Rp. 300-450 / orang / bulan
 - diberikan selama 3 bulan
 - diberikan kepada kepala keluarga sesuai jumlah anggota keluarga
 - saat ini sedang disesuaikan indeks jaminan hidup dari 10.000/hari menjadi 15.000 - 20.000/hari
- 3 Dukungan Pemberdayaan Ekonomi**
diberikan sesuai hasil asesmen, sebagai bantuan rintisan usaha
Rp. 5 juta / keluarga

Dukungan berupa Santunan

- 1 Santunan Korban Meninggal**
diberikan kepada Ahli Waris
Rp. 15 juta / korban
- 2 Santunan Korban Luka Berat**
Rp. 5 juta / korban

Catatan: Semua bantuan disalurkan bertahap, data tunggal diperoleh dari BNPB dan Persetujuan Pemda

Rencana Kebutuhan Penyaluran Santunan Ahli Waris Korban Meninggal

NO	WILAYAH	KEBUTUHAN DANA		
		VOLUME	INDEKS (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Provinsi Aceh	455 jiwa	15.000.000	6.825.000.000
2.	Provinsi Sumatera Utara	369 jiwa	15.000.000	5.535.000.000
3.	Provinsi Sumatera Barat	247 jiwa	15.000.000	3.705.000.000
	TOTAL	1.071		16.065.000.000

TEMUAN KOMPARASI DENGAN DATA SEKUNDER

ACEH	SUMATERA UTARA	SUMATERA BARAT
<p>Fungsi pasar: 65–70% pasar berfungsi dibandingkan pada fase awal.</p> <p>Akses rumah tangga: ±55–60% rumah tangga mengalami keterbatasan akses minggu pertama.</p> <p>Tren harga: Kenaikan 10–15% pada komoditas tertentu.</p> <p>Layanan keuangan: <50% akses layanan formal.</p>	<p>Fungsi pasar: 85–90% pasar berfungsi normal.</p> <p>Akses rumah tangga: >80% rumah tangga memiliki akses pasar dan transportasi.</p> <p>Tren harga: Kenaikan <5%, bersifat lokal dan sementara.</p> <p>Layanan keuangan: ±70% responden menggunakan layanan keuangan formal/digital.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi pasar: 75–85% pasar beroperasi pascabanjir. • Akses rumah tangga: ±70% rumah tangga dapat mengakses pasar dalam ≤60 menit setelah minggu pertama. • Tren harga: Kenaikan 5–10% pada pangan segar; beras relatif stabil. • Layanan keuangan: ±60% responden memiliki akses ke bank/agen laku pandai/e-wallet.
<p>Rekomendasi Operasional CVA: Pendekatan bertahap: In-kind → MPCA → voucher. CFW: Pemulihan akses desa, Rehabilitasi Fasilitas Umum dan mata pencaharian</p>	<p>Rekomendasi Operasional CVA: MPCA skala luas: Sangat layak. Voucher multi-sektor: Pangan & NFI. CFW: Rehabilitasi fasilitas umum dan DRR berbasis komunitas.</p>	<p>Rekomendasi Operasional CVA: MPCA (prioritas): Untuk memenuhi kebutuhan dasar non-spesifik. Voucher pangan: Di lokasi dengan fluktuasi harga rendah. CFW: Pembersihan lingkungan, perbaikan akses pasar</p>

INDIKATOR CVA

No	Indikator	Definisi Operasional	Alat Ukur / Data	Tujuan Penggunaan
1	Status terdampak bencana	Rumah tangga berada di wilayah terdampak banjir dan/atau mengalami kerusakan/kehilangan	SK Tanggap Darurat, data BPBD, verifikasi desa	Dasar legal kelayakan penerima
2	Kehilangan pendapatan	Penurunan/hilangnya sumber pendapatan utama akibat banjir	Survei cepat rumah tangga, JMA	Menilai kebutuhan CVA
3	Pengeluaran rumah tangga	Pengeluaran di bawah kebutuhan minimum	Susenas, 2024	Menentukan nilai transfer
4	Akses pangan	Gangguan akses fisik/ekonomi pangan	Survei HH, JMA	Justifikasi bantuan tunai
5	Fungsi pasar	Pasar beroperasi $\geq 50-70\%$	Joint Market Assessment	Prasyarat CVA
6	Kerentanan sosial	Perempuan KRT, lansia, disabilitas	Data desa, DTKS (SADD)	Prioritisasi penerima
7	Tidak menerima bantuan sejenis	Tidak menerima MPCA/bansos tunai lain	Koordinasi Pemda & Kemensos (Klaster PP)	Hindari duplikasi
8	Kebutuhan multisektor	Kebutuhan lintas sektor tinggi	JNA/JMA	Alasan MPCA vs sektoral
9	Kapasitas penggunaan tunai	Mampu mengelola uang tunai	Wawancara HH, JMA	Perlindungan & mitigasi risiko
10	Risiko perlindungan	Risiko PSEAH/keamanan rendah	Analisis konteks	Keamanan implementasi

RUJUKAN REGULASI

No	Regulasi / Kebijakan	Instansi	Relevansi terhadap MPCA
1	UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Pemerintah RI	Landasan bantuan darurat & pemulihan
2	Perka BNPB No. 4 Tahun 2008	BNPB	Pedoman pemberian bantuan sosial
3	RPJMN Perlindungan Sosial	Bappenas	Kerangka pemenuhan kebutuhan dasar
4	UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Pemerintah RI	Hak akses pangan
5	Permensos No. 3 Tahun 2021 (BPNT/Sembako)	Kemensos	Pembanding bantuan pangan
6	DTKS & SIKS-NG	Kemensos	Targeting & verifikasi penerima
7	Inpres No. 9 Tahun 2000 (PUG)	Pemerintah RI	Inklusi gender & kelompok rentan
8	Pedoman Klaster Nasional	BNPB	Koordinasi lintas sektor
9	Cash & Voucher Assistance Guidelines	Pokja BaNTu Indonesia	Panduan Pelaksanaan Pokja BaNTu
10	PSEAH & Perlindungan	BNPB/UN/Lembaga masing-masing	Mitigasi risiko
11	Permensos No 4, Tahun 2015 dan perubahannya di Permensos No 10 Tahun 2020	Kemensos	Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana;
12	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017	Pemerintah RI	tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai

PRINSIP CVA

1. CVA berangkat dari pemahaman bagaimana rumah tangga bertahan hidup

CVA membantu rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan mata pencaharian sebelum, saat, dan setelah krisis. Ini mencakup sumber pendapatan, pola pengeluaran, aset produktif, serta strategi bertahan yang digunakan ketika terjadi bencana seperti banjir.

2. Analisis coping mechanisms menjadi dasar kelayakan CVA

- a. Penilaian CVA melihat apakah rumah tangga menggunakan **strategi bertahan negatif**, seperti:
 - a. Menjual aset produktif (alat kerja, ternak, perahu, lahan sewa)
 - b. Berutang dengan bunga tinggi
 - c. Mengurangi konsumsi pangan atau kualitas makanan
 - d. Menghentikan sekolah anak atau menarik anggota keluarga ke pekerjaan berisiko
- b. Jika strategi ini meningkat, CVA digunakan untuk **mencegah penurunan/pengurangan mata pencaharian dan kesejahteraan jangka panjang**.

RUJUKAN UPAH MINIMUM PROVINSI

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025

- 1. Aceh. Rp3.685.615** (berlaku mulai 1 Januari 2025, mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan Aceh dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.15.14.1/1342/2024)
- 2. Sumatera Utara. Rp2.992.599** (Keputusan Gubernur Sumut Nomor: 188.44/807/KPTS/2024 tentang UMP Sumatera Utara Tahun 2025 tertanggal 6 Desember 2024)
- 3. Sumatera Barat. Rp2.994.193** (SK Gubernur Sumatera Barat No. 562-840-2024)

PENGELUARAN RATA-RATA BULANAN KELUARGA

1. Aceh: Rp1.264.733 (Rp722.434 untuk makanan).
2. Sumatera Utara: Rp1.340.957 (Rp734.270 untuk makanan).
3. Sumatera Barat: Rp1.480.853 (Rp797.728 for makanan).

Catatan:

Data ini merupakan rata-rata pengeluaran per kapita (per orang) per bulan, mencakup pengeluaran makanan dan non-makanan, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, dari survei SUSENAS tahun 2024 yang dirilis tahun 2025 oleh Badan Pusat Statistika.

REKOMENDASI NILAI TRANSFER CVA

CFW

- Prinsip Padat Karya Tunai Desa (PKTD): $\geq 50\%$ anggaran kegiatan untuk upah (Permendes PDTT) Rata-rata upah harian PKTD (Sumatra): Rp85.000–Rp120.000/hari
- Upah Minimum Provinsi: dibagi rata-rata hari kerja 25 hari
 - Aceh: $3.685.615/25 = 147.425$
 - Sumatera Utara: $2.992.599/25 = 119.703$
 - Sumatera Barat: $2.994.193/25 = 119.768$
- ● Nilai CFW indikatif: **Rp. 120.000/Hari/KK (Perwakilan Keluarga yang ikut bekerja 1 orang/KK)**, nilai tersebut agar tidak bersaing dengan PKTD Pemerintah dengan tambahan terpisah untuk BPJS, Perlengkapan Kerja, Safety Gear & administrasi FSP
- Untuk Kelompok Rentan yang tidak bisa/mampu/anak-anak untuk bekerja dapat disepakati model perwakilannya untuk memenuhi prinsip *Do No Harm* dan *No One Left Behind*

MPCA

- **Sumatera Barat:**
 - Pengeluaran rata-rata bulanan: Rp1.480.853/KK/bulan
 - Dikurangi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) (bila diterima): Rp200.000
 - **Rekomendasi MPCA:** Rp1.000.000/bulan/KK (pembayaran per bulan, maksimal 2 bulan)
- **Sumatera Utara:**
 - Pengeluaran rata-rata bulanan: Rp1.340.957/KK/bulan
 - Dikurangi BPNT: Rp200.000
 - **Rekomendasi MPCA:** Rp1.000.000/bulan/KK (pembayaran per bulan, maksimal 2 bulan)
- **Aceh:**
 - Estimasi MEB darurat: Rp1.264.733/KK/bulan
 - Dikurangi BPNT (akses terbatas): Rp200.000
 - **Rekomendasi MPCA:** Rp1.000.000/bulan/KK (pembayaran per bulan, maksimal 2 bulan)

Notes:

MPCA, Flat 1 juta/bulan/kk (harus dipertimbangkan transportasi utk wilayah terdampak dan disarankan distribusi dilakukan oleh FSP), 1 kali transfer, maks 2 bulan, untuk mengisi gap intervensi pemerintah. Prioritas distribusi awal untuk wilayah yang belum dapat jadup, karena saat ini pemerintah sedang proses pembayaran.

Rekomendasi Pokja BaNTu

BaNtu dapat dilakukan di wilayah yang pasar sudah berfungsi, setiap lembaga perlu memastikan kembali di wilayah target intervensi dengan monitoring pasar di wilayah yang menjadi target

Distribusi BaNTu harus melalui Lembaga Keuangan

Setiap organisasi memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi awareness CVA kepada masyarakat => POKJA BANTU siapkan panduan

Nilai Transfer MPCA flat: Rp 1.000.000,- maksimal 2 bulan, dengan opsi pemberian TOP UP diberikan untuk keluarga dengan kebutuhan khusus (GEDSI) => memastikan proses pemilihan penerima manfaat jelas di sosialisasikan kepada masyarakat (organisasi yang memberikan TOP UP, menyediakan rasionalisasi nilai transfer dan di koordinasikan kepada POKJA). Poin yang disosialisasikan adalah: **Rasionalisasi, Tujuan dan Besaran**. Hal ini untuk memastikan anggota pokja lain yang punya tujuan sama dapat menyelaraskan nilai TOP UP untuk memastikan Do No Harm dan memitigasi potensi konflik di masyarakat.

Nilai Transfer untuk BaNTu Daya/ Cash for Work: sebesar Rp 120.000/ hari/ KK dan dipastikan dengan perlindungan asuransi ketenagakerjaan dan Alat serta APD

Kesepakatan nilai transfer ini akan dibantu proses advokasi bersama dengan IHCP melalui koordinator wilayah bekerjasama dengan PIC wilayah dari Pokja BaNTu. Nilai transfer diharapkan dapat dibuatkan SK Gubernur, jika tidak memungkinkan direkomendasikan menjadi surat edaran.

- **ACEH: Koordinator IHCP dan KKSP/STC (Bu Meili), CBM-YEU, MCI-HI**
- **SUMUT: Koordinator IHCP dan ADRA, KKSP,WVI**
- **SUMBAR: Koordinator IHCP dan JEMARI Sakato, Plan, PMI**

POKJA Fasilitasi koordinasi untuk monitoring harga pasar dan ketersediaan bersama-sama dengan anggota pokja.

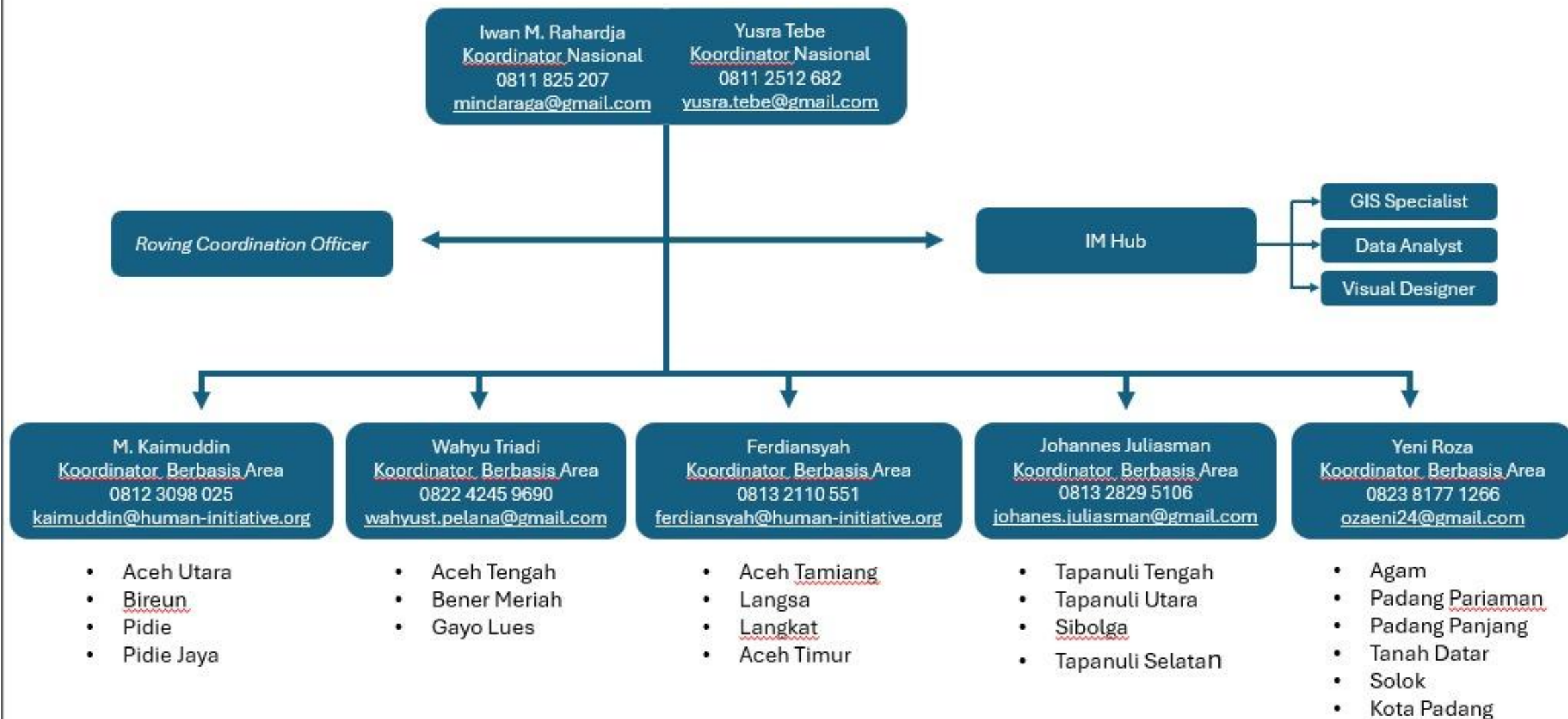
UPDATE Top Up MPCA kebutuhan kelompok rentan

Sejauh ini, berdasarkan pembelajaran dr rekan2 CBMG kebutuhan MPCA penyandang disabilitas, lbh tgi antara 8-30% karena kebutuhan biaya kesehatan dan terapi, makanan bernutrisi, biaya transport yg lbh tgi. Melihat besaran PKH penyandang disabilitas berat sebesar 2,4JT/ tahun = 200K/ bulan.

Hasil diskusi: menyepakati besaran TOP UP sebesar 25% dr nilai kesepakatan MPCA (Jt) yaitu sebesar Rp 250.000,-.

Memastikan pemilihan penerima bantuan dpt inklusi salah satunya dengan menggunakan WGQ (Washington Group Question).

Pengaturan Koordinasi dan Peran IHCP



TERIMA KASIH

Pokja BaNTU

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Finalisasi Panduan CFW dan MPCA
2. Finalisasi Regulasi untuk rujukan bersama (Mis. SK Gubernur atau Surat Rekomendasi Gubernur untuk pelaksanaan BNT)-Proses yang lebih cepat
3. Sosialisasi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Implementator
- 4.